

MASJID DAN PERAYAAN IDUL FITRI

**(Studi tentang Masjid dan Perbedaan Penentuan Tanggal 1 Syawal di Pedukuhan
Ngemplak Karangjati)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S. Sos)**

Oleh :

MUHAMMAD TSANI IMAMUDDIN DESYA

NIM: 04541700

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

MASJID DAN PERAYAAN IDUL FITRI

(Studi tentang Masjid dan Perbedaan Penentuan Tanggal 1 Syawal di
Pedukuhan Ngemplak Karangjati)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh :

MUHAMMAD TSANI IMAMUDDIN DESYA

NIM: 04541700

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**



Dr. H. M. Amin Lc, MA

Dosen Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Tsani Imamuddin Desya

Lamp. : 4 eksemplar.

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara :

Nama : **Muhammad Tsani Imamuddin Desya**
NIM : **04541700**
Judul Skripsi : **Masjid Dan Perayaan Idul Fitri**
(Studi Tentang Masjid dan Perbedaan Penentuan Tanggal 1 Syawal di Pedukuhan Ngemplak Karangjati)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di Munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 November 2009
Pembimbing

Dr. H. M. Amin Lc, MA
NIP. 19630604 199203 1003



PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/2035/2009

Skripsi dengan judul : **Masjid dan Perayaan Idul Fitri**
(Studi Tentang Masjid Dan Perbedaan Penentuan Tanggal I
Syawal Di Pedukuhan Ngemplak Karangjati)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Tsani Imamuddin Desya
NIM : 04541700
Program Sarjana : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Telah di Munaqasyahkan pada hari: Selasa, 10 November 2009 dengan Nilai: A/B
dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S. Sos) oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. H. M. Amin Lc. MA
NIP. 19630604199203 1 003

Penguji I

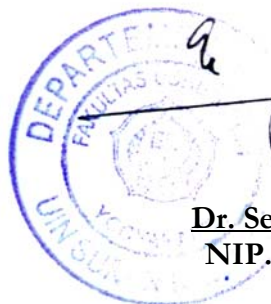
Ustadi Hamzah, S.Ag, M.Ag
NIP. 19741106 200003 1 001

Penguji II

Moh. Soehadha, S.Sos, M. Hum
NIP. 19720417199903 1 003

Yogyakarta, 10 November 2009

DEKAN



Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag
NIP. 19591218 198703 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Tsani Imamuddin Desya
NIM : 04541700
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama
Alamat Rumah : RT. 09 RW. 38 Ngemplak Karangjati Sleman
E-mail : tsani@gmail.com
Judul skripsi : **Masjid Dan Perayaan Idul Fitri**
(Studi Tentang Masjid dan Perbedaan Penentuan
Tanggal 1 Syawal di Pedukuhan Ngemplak Karangjati)


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah di Munaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal Munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia Munaqasyah kembali.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 November 2009

Saya yang menyatakan,


(Muhammad Tsani Imamuddin Desya)

ABSTRAK

Dalam skripsi ini dibicarakan mengenai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat, terkait adanya perbedaan dalam penentuan tanggal 1 Syawal. Adanya perbedaan metode dalam menentukan tanggal 1 Syawal memang lebih pada permasalahan teologis. Namun ketika perbedaan tersebut dilihat dari segi implikasinya pada kehidupan masyarakat, hal tersebut membawa pengaruh secara sosial. Salah satu masyarakat yang mengalami hal tersebut, yang selanjutnya menjadi objek penelitian dalam skripsi ini, yaitu masyarakat di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, kelurahan Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta.

Salah satu pengaruh sosial dari adanya perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal tersebut yaitu munculnya konflik. Ketika melihat permasalahan tersebut dalam kehidupan keagamaan masyarakat Pedukuhan Ngemplak Karangjati, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai masjid-masjid yang ada di Pedukuhan ini. Hal ini dikarenakan adanya kaitan erat antara elit masjid dan kekuasaan dengan perbedaan seputar perayaan hari raya yang timbul di masyarakat, terkait adanya perbedaan dalam penentuan tanggal 1 Syawal. Selain itu, masjid juga merupakan institusi keagamaan yang keberadaannya lekat sekali dengan masyarakat.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. sedangkan analisis yang dilakukan bersifat deskriptif. Pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dari hasil pendiskripsian dari realitas sosial yang ada. Sifatnya yang deskriptif, merupakan upaya dari penggambaran dari keadaan masyarakat serta pengaruhnya pada pusat kekuasaan elit agama. Keberadaan masjid sebagai tempat elit-elit tersebut menjalankan fungsi, peran, serta membangun kekuasaannya. Dari sinilah kemudian berkembang pada masalah perbedaan yang terjadi di masyarakat seputar perayaan Idul Fitri, terkait adanya perbedaan dalam penentuan tanggal 1 Syawal.

Dari hasil penelitian ini ditemukan adanya pergeseran pusat kekuasaan dari elit-elit agama. Pergeseran pusat kekuasaan tersebut merupakan akibat dari adanya perubahan masyarakat. Elit-elit yang sebelumnya berada pada pusat kekuasaan umum kemudian terbagi pada pusat-pusat kekuasaan khusus. Kemunculan masjid-masjid baru di Pedukuhan Ngemplak Karangjati selanjutnya menjadi basis pusat kekuasaan khusus tersebut. Masalah kemudian muncul ketika terjadi perbedaan diantara elit agama dalam mensikapi perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal. Kesepakatan yang sebelumnya dicapai oleh para elit ketika berada pada pusat kekuasaan umum tidak lagi dapat dipertahankan ketika menempati pusat kekuasaan khusus. Kesepakatan sebelumnya yaitu untuk tidak berbeda antar masjid dalam mengambil keputusan terkait penentuan tanggal 1 Syawal. Konflik itu sendiri terjadi antara elit masjid yang satu dengan elit masjid yang lain. Disatu sisi terdapat elit yang mencoba memperjuangkan kesepakatan lama, sedangkan di pihak lain terdapat elit agama yang mempertahankan dan memperjuangkan kesepakatan baru di intern masjid mereka.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala anugerahnya yang tiada terhingga. Allah masih berkenan memberikan kekuatan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu, segala kritik, masukan serta saran, sangat penulis harapkan untuk lebih sempurnanya skripsi ini.

Terlepas dari semua kekurangan tersebut, selesainya penulisan skripsi ini tidak luput dari dukungan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang kepada:

1. Kedua orangtuaku, Bpk. Drs Gampang Sagimin dan Ibu Badriyatun yang telah yang telah membesarkan dan mendidiku selama ini. Maafkan atas keterlambatan penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bpk. Dr. H. M. Amin, Lc, MA, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Yang telah dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan serta motivasi kepada penulis.
4. Bpk. Moh Soehadha, S.Sos, M.Hum, selaku penasehat akademik penyusun skripsi ini. Kenangan berkesan selama perjalanan pulang dari

Kemukus, saat harus pulang tanpa kendaraan kampus. Satu bungkus rokok gratis masih saja teringat di benak penulis.

5. Bpk. Rahmanto selaku staf Tata Usaha Prodi Sosiologi Agama, serta segenap Pimpinan dan staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin.
6. Kakakku Ekawati Munawaroh, Mas Nur Kholis, Kedua adikku M. Ismail Sam Imaduddin dan M.Yulfa Azharuddin, serta keponakanku Naurah Sa'adah, yang telah banyak menghilangkan kepenatan penulis dengan senyum manisnya.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Prodi Sosiologi Agama (SA) angkatan 2004. Mohon maaf atas semua kesalahan penulis selama ini.
8. Sahabat-sahabat penulis dari SA, Tito "Ely Eboy", Fajar, Sufi, Tarno, Kang Iqbal 'banotong' Muttaqin (*numun banget kang wis diwangi. Suk nek wedangan meneh, pisan-pisan mbok aku sing mbayari*). Maaf jika penulis sering keterlaluhan dalam bercanda. Sudah banyak yang kita alami, tertawa bersama, lapar bersama, kenyang bersama, saling benci, saling hina, bertengkar, saling memaafkan, bertindak konyol tak bermutu, berlagak menjadi penguasa dunia (*Ing mongko ming tukang sambat, judeg ro lalen*). Selamat memperjuangkan idealisme kalian masing-masing.
9. Teman seperjuangan menyelesaikan Tugas Akhir, Vha Marbols, Kru 'saltyfish': Jen, Anie, Pungky, Wongso, Ruby (kisah "telenovela murahanku" tak seindah "Sinar di Sudut Jogja" kalian), Eka Aji Pratiwi (Semangat!), Podo Hartito (koe pengen lulus kapan bro!???)
10. Bapak Suharjo, teman-teman kampung: Mas Tohari, Mas Rahmat Tiarso, Triyono, Mas Karmin, Mas Ayep Rosyidi, Mas Dedy.

11. Teman-teman yang banyak memberiku semangat dan bantuan, Dian Cemel (terimakasih sms-sms nya), Dendy (terimakasih pinjaman bukunya), Diah Cahyaning W (sehari mengurus surat ijin bersama, terasa seperti bermain sinetron). Gadis manis berkacamata, di bangku abu-abu kampus biru (dalam diam dan tanpa nama, kau telah banyak membantuku). Teman-teman mancing: Wahyu Tekong, Tono Priatin S.Pd (ahirnya kita menjadi sarjana "bermutu" juga), Ambon Mukerece, Insan Prasetyo, Didi "sjaah marley".

12. Crew FURT 'sanitarium': Nhy, Sun, Sany, Karjo, Mimind.

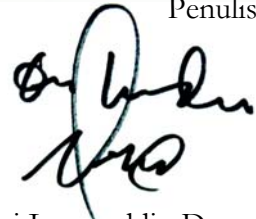
Penulis Juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi. Juga semua pengarang buku dan artikel, yang penyusun cantumkan di Daftar Pustaka.

Akhirnya, penulis berdoa agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. Semoga karya tulis sederhana ini mampu memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 November 2009

Penulis



M. Tsani Imamuddin Desya

8DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II : DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN..... 25

A. Keadaan Geografis.....	25
B. Keadaan Penduduk.....	30
C. Pendidikan.....	33
D. Mata Pencarian.....	35
E. Kondisi Keagamaan.....	38

BAB III : MASJID DAN PERBEDAAN SEPUTAR PERAYAAN IDUL

FITRI..... 41

A. Masjid dan Masyarakat.....	41
1. Sejarah Masjid.....	42
2. Keadaan Masyarakat.....	51
a. Masyarakat Ketika Belum Banyak Masjid.....	52

b. Masyarakat Ketika Banyak Masjid.....	61
B. Perbedaan Seputar Perayaan Idul Fitri.....	65
1. Argumen Teologis Penentuan Tanggal 1 Syawal.....	66
2. Masjid dan Perayaan Idul Fitri.....	71
 BAB IV : ELIT DAN KONFLIK SEPUTAR PERAYAAN IDUL FITRI....	78
A. Afiliasi Masjid.....	78
B. Konflik Seputar Perayaan Idul Fitri.....	86
C. Keberadaan dan Peran Elit.....	95
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh perbedaan-perbedaan, baik horisontal maupun vertikal. Perbedaan secara horisontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat-istiadat, dan agama. Sedangkan perbedaan yang bersifat vertikal antara lain ditandai oleh adanya pengelompokan masyarakat antara lapisan atas dan lapisan bawah, baik di bidang agama, sosial, ekonomi maupun politik.¹

Dalam bidang agama, sebagai suatu sistem akan selalu mencakup individu dan masyarakat, seperti adanya emosi keagamaan, keyakinan terhadap sifat paham, ritus dan upacara, serta umat atau kesatuan sosial yang terikat terhadap agamanya. Agama dan masyarakat dapat pula diwujudkan dalam sistem simbol yang memantapkan peranan dan motivasi individu, yang kemudian daripadanya akan tercipta hukum yang terstruktur dan ketentuan yang berlaku umum. Seirama dengan perkembangan masyarakat, maka akhirnya dapat dimengerti apabila terdapat dinamika dalam hukum beragama. Namun substansi dari hukum agama tersebut biasanya menekankan pada hal-hal yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan oleh penganut agama.²

¹ Sudjangi, *Pluralitas Sosial, Hubungan Antara Kelompok Agama dan Kerukunan*, dalam Jurnal Harmoni vol.II No 5 (Yogyakarta, 2003), hlm 12.

² Sunyoto Usman, *Agama dan Aspirasi Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 243.

Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang diyakini sebagai kebenaran tunggal, ditafsirkan penganutnya secara berbeda dan berubah-ubah, yang diakibatkan oleh perbedaan kehidupan sosial penganut yang juga terus berubah. Lahirlah kemudian Mazhab Syari'ah (fikih) dan Kalam (tauhid) yang saling berbeda seperti perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdatul ulama (NU).³

Keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan kenyataan bahwa Al-Qur'an dan Sunah sebagai sumber hukum primer dalam Islam bersifat multi tafsir, membuat masyarakat Islam di Indonesia kemudian sangat majemuk dalam hal aliran, paham, dan organisasi sosial keagamaan. Masing-masing aliran, paham, ormas tersebut mempunyai ideologi tersendiri yang tentu saja berbeda satu dengan yang lain, atau bahkan dimungkinkan saling bertentangan.

Berbicara mengenai kemajemukan di kalangan umat Islam Indonesia tersebut, belakangan ini ada sebuah fenomena yang menarik untuk diamati. Fenomena menarik tersebut yaitu mengenai terjadinya perbedaan di dalam masyarakat dalam hal penentuan tanggal 1 Syawal dalam kalender Hijriyah, yang berarti pula menjadikan adanya perbedaan dari segi waktu pelaksanaan Sholat Ied di kalangan umat Islam Indonesia. Sebuah perbedaan yang terjadi sebagai salah satu bentuk kayanya penafsiran terhadap sumber hukum primer dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang juga merupakan gambaran betapa beragamnya masyarakat muslim Indonesia, karena bahkan di Arab tempat Islam lahir tidak sampai terjadi hal seperti itu.

³ Abdul Munir Mulkhan, *Islam Murni Dalam Masyarakat Petani* (Yogyakarta:Yayasan Benteng Budaya, 2000), hlm. 1.

Terjadinya perbedaan penentuan 1 Syawal tersebut tentu membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia, mengingat dengan adanya perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal tersebut, berarti pula perbedaan dari segi waktu dalam melaksanakan hari raya Idul Fitri. Hari raya Fitri yang merupakan salah satu peringatan hari besar Islam yang penting, dimana sebelumnya umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadhan selama sebulan penuh, diwajibkan pula membayar zakat bagi yang mampu sebagai pembersih puasanya, kemudian puncaknya yaitu hari raya Idul Fitri. Pada hari inilah umat Islam yang setelah sebulan penuh melaksanakan puasa mendapatkan *reward* dengan kembali suci, bersih dari dosa sebagaimana bayi yang baru lahir.

Dengan adanya perbedaan waktu pelaksanaan hari raya tersebut tentu akan membuat nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam peringatan Idul Fitri kemudian hilang dan berganti dengan kesan perpecahan. Pada tingkat terkecil dari kelompok masyarakat berupa keluarga dapat dibayangkan bila dalam suatu keluarga antara orang tua dan anak saling berbeda waktu dalam merayakan Idul Fitri. Pada tingkat yang lebih besar pelaksanaan Sholat Ied yang tidak bersamaan akan berdampak lebih besar, bahkan menuju ke arah desosiatif. Terbaginya masyarakat yang sebenarnya satu, yaitu masyarakat muslim, kedalam kelompok massa dengan keyakinan yang berbeda mengenai perhitungan bulan Ramadhan akan menimbulkan perang argumen. Pada masyarakat yang terbilang dewasa dalam menyikapi perbedaan hal tersebut tentu tidak terlalu menjadi masalah. Namun ketika perbedaan tersebut terjadi di dalam masyarakat yang belum terbiasa akan perbedaan, tentu akan menimbulkan masalah tersendiri.

Salah satu masyarakat yang mengalami dampak dari adanya perbedaan pendapat tentang penentuan tanggal 1 Syawal tersebut yaitu masyarakat di Pedukuhan Ngemplak Karangjati Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta. Sejak terjadi perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal akhir-akhir ini, sejumlah masjid yang ada di Pedukuhan Ngemplak Karangjati mengambil keputusan yang berbeda satu sama lain dalam hal waktu berhari raya. Selain itu belakangan ini muncul pula sebuah fenomena unik terkait permasalahan seputar perayaan hari raya tersebut. Fenomena tersebut yaitu, banyaknya penyelenggaraan Sholat Ied oleh masjid-masjid di wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati ini.

Dahulu penyelenggaraan Sholat Ied di Karangjati hanya di satu tempat, yaitu masjid Mujahadah. Saat ini, terbilang sebanyak tiga dari keseluruhan lima masjid yang ada di Ngemplak Karangjati, menyelenggarakan Sholat Ied di tempatnya masing-masing. Ketiga masjid tersebut yaitu : Masjid Sabilul Muttaqin, Masjid Mujahadah, dan Masjid Shirathal Mustaqim. Pendirian Sholat Ied secara sendiri-sendiri oleh tiga masjid, terbilang sebagai angka yang besar mengingat wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati yang tidak terlalu luas. Karena itulah dapat dikatakan sebagai fenomena yang unik, karena di pedukuhan lain dimungkinkan tidak terjadi hal semacam ini.

Pelaksanaan Sholat Ied di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, sebelumnya hanya dilaksanakan di satu tempat, yaitu di Masjid Mujahadah. Kemudian pada tahun 2006, masjid Sabilul Muttaqin yang di *back-up* oleh NS, mulai menggunakan tempatnya untuk menyelenggarakan Sholat Ied. Dan pada awal tahun 2008, barulah selanjutnya Masjid Shiratal Mustaqim menjadi penyelenggaraan Sholat Ied yang ketiga di di wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Berbeda dengan

kedua masjid sebelumnya, Masjid Shiratal Mustaqim tidak menyelenggarakan Sholat Ied di masjid, melainkan di lapangan. Penyelenggaraan sholat Ied oleh masjid Shiratal Mustaqim tersebut diprakarsai oleh GP.

Dari penelusuran yang dilakukan penulis sejauh ini diketahui bahwa masjid yang pertama kali dibangun di Pedukuhan Ngemplak Karangjati adalah Masjid Mujahadah yang terletak di tengah-tengah wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Setelah Masjid Mujahadah tersebut, barulah kemudian pada awal tahun 90-an satu demi satu mulai dirintis pembangunan empat masjid lainnya. Pembangunan empat masjid lain tersebut, oleh elit-elit agama dan masyarakat pada saat itu, selain dimaksudkan untuk mengintensifkan pembinaan keagamaan di wilayah pinggiran Karangjati juga ditujukan sebagai benteng Kristenisasi. Karena itulah dapat dilihat letak ke empat masjid tersebut berada di pojok-pojok wilayah Karangjati. Masjid Shirathal Mustaqim terletak di sudut Barat Daya, sedangkan masjid Sabilul Muttaqin terletak di sudut Tenggara wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati, kemudian kedua masjid lainnya yaitu masjid Miftahul Huda dan Imadul Muslimin masing-masing terletak di sudut Barat Laut dan Timur Laut wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati.

Para perintis berdirinya masjid-masjid, pada saat itu tidak menginginkan pembangunan empat masjid lain di wilayah Ngemplak Karangjati yang sebelumnya lebih ditujukan untuk pengintensifan pembinaan keagamaan wilayah pinggiran tersebut, selanjutnya justru akan memecah jamaah muslim Ngemplak Karangjati. Karena itulah setelah pembangunan masjid-masjid tersebut selesai kemudian didirikan sebuah organisasi yang menaungi seluruh masjid yang terdapat di dalam wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Organisasi dengan

nama PAMUKTI (Paguyuban Masjid dan Mushalla Ngemplak Karangjati) tersebut adalah organisasi dengan salah satu visi misi menjaga persatuan seluruh umat muslim khususnya umat muslim di wilayah Ngemplak Karangjati.

Salah satu fungsi PAMUKTI, yaitu sebagai wadah yang mengkoordinir masjid-masjid yang ada di wilayah Ngemplak Karangjati. Berkurangnya fungsionalitas dari organisasi tersebut dapat dikatakan menjadi salah satu awal terpecahnya umat muslim Pedukuhan Ngemplak Karangjati dalam melaksanakan hari raya terutama dalam hal penyelenggaraan Sholat Ied. Elit-elit masjid yang pernah tergabung dalam organisasi dengan visi persatuan tersebut, kini lebih disibukkan pada kepentingan intern masjid. Keadaan tersebut membuat seolah terjadi perlombaan dalam membangun otonomi masjid, yang berarti pula membangun sekat antar masjid yang ada wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Salah satu manifestasi dari keadaan tersebut, yaitu terjadinya penyelenggaraan Sholat Ied secara terpisah-pisah.

Perbedaan penentuan 1 Syawal sebenarnya bukan hal yang baru di Pedukuhan Ngemplak Karangjati ini. Dahulu ketika PAMUKTI masih eksis ketika terjadi perbedaan penentuan 1 Syawal maka akan diadakan semacam “rapat istimewa” yang biasanya digelar menjelang hari raya, dengan tujuan bagaimana masjid dan mushalla yang berada di Pedukuhan Ngemplak Karangjati bisa satu suara dalam menentukan hari raya. Keputusan yang biasa diambil yaitu mengikuti keputusan pemerintah, yang dalam hal ini posisinya dianggap sebagai hakim.

Permasalahan kemudian akan lebih menarik jika dilihat dari segi waktu pelaksanaan dan tempat penyelenggaraan. Dari segi waktu pelaksanaan diantara ketiga masjid yang menyelenggarakan Sholat Ied tersebut dua diantaranya

cenderung menyelenggarakan pada waktu yang sama, yaitu Masjid Sabilul Muttaqin dan Masjid Mujahadah. Namun, adanya persamaan tersebut, tidak menjadikan kedua masjid tersebut melaksanakan Sholat Ied di satu tempat, padahal kedua masjid tersebut letaknya dapat dikatakan kurang begitu berjauhan. Kedua masjid tersebut ketika terjadi perbedaan penentuan 1 Syawal cenderung mengikuti pada hari yang lebih awal, dalam hal ini merupakan hari yang lebih sering dilatarbelakangi oleh keputusan dari Muhammadiyah. Sedangkan satu masjid lainnya, yaitu Masjid Shirathal Mustaqim, ketika terjadi perbedaan, cenderung mengikuti pada hari yang kedua, yang dalam hal ini lebih sering merupakan keputusan dari pemerintah.

Dari segi tempat penyelenggaraan, Masjid Mujahadah dan Masjid Sabilul Muttaqin lebih memilih untuk melaksanakan sholat Ied di masjid. Sedangkan masjid Shirathal Mustaqim lebih memilih untuk menyelenggarakan Sholat Ied di lapangan dengan maksud dapat menampung jamaah lebih banyak. Ada kecenderungan terlihat dari sini bahwa elit-elit takmir masjid Shirathal Mustaqim memiliki keinginan hendak mengembalikan kondisi umat muslim Karangjati dalam nuansa persatuan seperti pada masa lalu. Keinginan tersebut dapat dilihat jika mengingat pada berapa hal yaitu : *pertama*, penyelenggaraan Sholat Ied oleh Masjid Shirathal Mustaqim dilaksanakan beberapa tahun setelah terjadi pendirian Sholat Ied secara terpecah oleh dua masjid di Ngemplak Karangjati. *Kedua*, pemilihan penentuan tanggal 1 Syawal dengan mengikuti keputusan pemerintah, yang dalam hal ini merupakan keputusan yang lebih netral. *Ketiga*, pilihan Masjid Shirathal Mustaqim untuk menyelenggarakan Sholat Ied di lapangan dengan maksud dapat menampung semua jamaah muslim Ngemplak Karangjati. Selain

itu pemberian nama lapangan dengan nama “Jati Manunggal” semakin mempertegas tujuan tersebut.

Pertanyaan yang kemudian muncul yaitu; apakah langkah yang diambil oleh sejumlah elit agama di Masjid Mujahadah dan Sabilul Muttaqin merupakan sebuah wujud penguatan posisinya sebagai elit agama? Karena langkah integrasi hanya akan membuatnya sebagai elit sekunder, mengingat akan ada lebih banyak elit agama yang mengambil peran. Ataukah ide integrasi selama ini, merupakan suatu hegemoni dari elit agama tertentu untuk mempertahankan posisinya sebagai elit agama sentral, sehingga langkah dis-integrasi sejumlah elit agama dapat dikatakan sebagai suatu indikasi semakin dewasanya elit agama yang selama ini terkekang. Berbagai asumsi tersebut akan semakin kuat mengingat posisi sebagai elit agama, khususnya elit agama primer akan mendatangkan hak-hak istimewa (*privilege*) tersendiri dari masyarakat.

Penulis menilai permasalahan tersebut akan menarik untuk dianalisa, hingga kemudian mengangkatnya sebagai latar belakang permasalahan dari skripsi yang akan disusun penulis. Akan menarik untuk dianalisa jika dikaitkan dari sudut pandang bagaimana masing-masing elit agama serta masyarakat memaknai dengan interpretasi yang berbeda, berbagai dinamika seputar penyelenggaraan Sholat Ied di Pedukuhan Ngemplak Karangjati.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, diketahui adanya perubahan kearah dis-integrasi diantara umat muslim Ngemplak Karangjati yang tercermin dalam kebijakan masjid-masjid yang ada di Pedukuhan ini. Perubahan ke arah dis-

integrasi tersebut terlihat dari adanya perbedaan dalam dinamika perayaan hari raya di kalangan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil masjid tersebut tidak dapat dilepaskan dari peranan elit Masjid. Sebagai akibat dari perbedaan tersebut mengakibatkan pula pada munculnya konflik. Dari sini, kemudian penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konflik yang terjadi, terkait perbedaan dalam perayaan Idul Fitri di Pedukuhan Ngemplak Karangjati?
2. Bagaimanakah peran elit masjid pada terjadinya perbedaan dan konflik seputar perayaan Idul fitri tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui konflik yang terjadi, terkait adanya perbedaan diantara masyarakat dalam perayaan Idul Fitri di Pedukuhan Ngemplak Karangjati.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa bagaimanakah peran elit masjid pada terjadinya perbedaan dan konflik seputar perayaan Idul Fitri di Pedukuhan Ngemplak Karangjati tersebut.

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan untuk dicapai dari penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan khususnya dalam bidang sosial keagamaan.

2. Secara praktis dapat bermanfaat sebagai masukan bagi lembaga-lembaga pembinaan masyarakat dalam mengambil langkah-langkah kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran penulis, beberapa orang yang pernah melakukan penelitian tentang keadaan sosial kemasyarakatan di suatu tempat, yang terkait dengan elit agama dan juga adanya perbedaan dalam suatu masyarakat yaitu, penelitian terhadap elit agama yang dilakukan oleh Mahfud Adnan Sebuah penelitian berupa skripsi dengan judul “Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan Perseteruan Elit (Agama/Lokal): Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Sragen Tahun 2006. Pada skripsi ini pembaca diajak mengetahui fenomena perseteruan elit lokal pada pilkada di Kabupaten Sragen pada tahun 2006 yang mengusung dua calon kandidat, yaitu Untung + Agus, dan Inggus + Mahmudi. Adapun perseteruan antar elit (lokal/agama) tersebut dilatar belakangi karena dugaan telah terjadi pemalsuan ijasah oleh salah satu kandidat.

Dari riset yang dilakukan tersebut, ditemukan bahwa perseteruan yang terjadi di lapangan antara elit agama pada pilkada di Kabupaten Sragen tahun 2006 lalu lebih banyak disebabkan karena, *pertama*: faktor kepentingan pribadi para elit (lokal/agama) karena merasa kurang diperhatikan kesejahteraan hidupnya, yang mengakibatkan makna pilkada sebagai proses pendewasaan politik daerah sedikit tercederai. *Kedua*: adanya keinginan proses pelaksanaan pilkada secara adil, jujur, tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pilkada seperti

money politic. Hal seperti pemalsuan ijazah, ataupun *meney politic*, terkesan tidak bisa dibuktikan secara riil, toh pada kenyataannya pilkada berjalan aman dan sukses.

Penelitian lain berbicara mengenai pola interaksi masyarakat di tengah perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muklas Hanif. Sebuah skripsi dengan judul “Muhammadiyah Ditengah Masyarakat Nahdatul Ulama (NU) di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur (Studi tentang pola interaksi sosial). Riset ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan guna melihat bagaimana warga Kalibaru dengan latar belakang organisasi yang saling berbeda tersebut berinteraksi. Penelitian tersebut menangkap sebuah perubahan yang terjadi pada organisasi Muhammadiyah di Kalibaru seiring berjalannya waktu.

Pada masa awal kepemimpinan Muhammadiyah di Kalibaru masih konsisten dengan tujuan semula (kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis), tidak ada sikap toleran terhadap tradisi-tradisi Nahdatul Ulama disana. Kurang diminatinya Muhammadiyah, seiring juga dengan berkurangnya ahli Syari'ah dalam kepemimpinan Muhammadiyah yang diakibatkan oleh modernisasi pendidikan, serta tuntutan situasi dan kondisi dari lingkungan yang mengitarinya, yang tidak bisa dihindari oleh warga Muhammadiyah, menjadikan warga Muhammadiyah di Kecamatan Kalibaru harus rela untuk menjadi toleran terhadap tradisi-tradisi dan ritual-ritual yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai TBC (tahayul, bid'ah, Churafat).

Melalui pelaksanaan penelitian ini diketahui bahwa interaksi sosial kearah positif antara warga Muhammadiyah dan warga Nahdatul Ulama di Kecamatan Kalibaru akan semakin terbuka dan luas jika warga Muhammadiyah mau toleran

terhadap tradisi-tradisi yang ada, akan tetapi hubungan harmonis tersebut akan berubah menjadi konflik jika warga Muhammadiyah dan warga Nahdatul Ulama bersikeras untuk saling berpegang teguh pada visi dan misi organisasi masing-masing.

Akhmad Yusuf Khoiruddin menulis tentang konflik yang terjadi antara pemuka agama setempat karena adanya perbedaan persepsi terhadap adanya tradisi tahlilan di tengah masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Blunyah Gede, Kelurahan Sinduadi Mlati Sleman ini menunjukkan bahwa, tradisi tahlilan yang sebelumnya kurang begitu hidup di kalangan masyarakat Blunyah Gede, dikarenakan afiliasi theologis masyarakat cenderung berafiliasi kepada Muhammadiyah. Namun ketika terjadi kondisi *vacuum of power* kepemimpinan kehidupan keagamaan karena kematian salah seorang pemuka agama sentral, menjadikan pemuka agama yang pro-tahlilan memiliki peluang untuk melakukan penetrasi tradisi tahlilan pada masyarakat.

Setelah peluang tersebut muncul, ternyata ditanggapi secara tidak rela oleh pemuka agama lain yang anti tahlilan, sehingga kemudian terjadi konflik antar pemuka agama yang bersifat latent. Konflik yang ada tersebut membutuhkan media kanalisasi konflik yang selanjutnya memunculkan *safety-valve institution*, serta juga memunculkan hubungan-hubungan patronase pada masing-masing kelompok internal pihak yang berkonflik.

Masyarakat yang berada pada strata grass-root memaknai konflik yang ada tentang tradisi tahlilan tersebut tidak dengan melalui perspektif konflik yang bernuansa theologis, namun lebih kepada pemahaman tentang hubungan horisontal sosial dari pemuka agama yang berkonflik. Selain itu retorika dakwah

dari masing-masing pemuka agama yang sedang berkonflik dijadikan variabel yang signifikan bagi masyarakat untuk memposisikan diri pada pusaran konflik yang sedang berlangsung.

Ketika masyarakat telah mengambil sikap kepada siapa menentukan pilihan pada pemuka agama yang sedang berkonflik, di sisi lain mereka tidak berkeinginan untuk merusak keharmonisan sosial yang sebelumnya telah tercipta dalam kehidupan sosialnya. Terlebih lagi, hal tersebut *diback-up* secara konsisten oleh pemuka agama yang pro tahlilan. Kondisi semacam ini menjadikan masyarakat Blunyah Gede semakin menunjukkan fenomena kearah menerima keberadaan tradisi tahlilan.

Tulisan lain berbicara tentang hisab dan rukyat, terkait dengan penentuan tanggal 1 Syawal, oleh Susiknan Azhari. Buku yang merupakan wacana untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan tersebut, menguraikan beberapa hal mengenai metode hisab dan rukyat. Bahwa metode hisab dan rukyat adalah *two face in the one coin*. Hal ini dikarenakan objek dari kedua metode tersebut adalah satu dan sama, yaitu keadaan bulan dilihat dari posisi matahari. Karena itulah, penentuan awal bulan dengan hisab maupun rukyat, secara ideal seharusnya menghasilkan suatu kesimpulan yang sama. Kenyataan akan adanya perbedaan diantara pemakai metode hisab dan rukyat, lebih disebabkan oleh perbedaan ciri dan rumusan dari masing-masing metode tersebut. Perbedaan tersebut lahir dari berbedanya penafsiran oleh masing-masing aliran ataupun mazhab yang ada. Oleh karena itu, untuk membangun suatu kebersamaan, sangat diperlukan komunikasi dari masing-masing aliran dan mazhab tersebut. Yaitu, komunikasi

yang ajeg dan berkesinambungan, dengan dilandasi suatu cita-cita untuk tercapainya suatu kesepakatan bersama.

Beberapa tinjauan pustaka yang telah penulis sebutkan dan uraikan di atas dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan merupakan sebuah penelitian baru ataupun berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Letak perbedaan sehingga penelitian yang dilakukan penulis dapat dikatakan sebagai penelitian baru yaitu dari segi obyek penelitian, lokasi penelitian, permasalahan penelitian dan setting sosial daerah penelitian.

E. Kerangka Teori

Masjid secara teologis dapat dimaknai sebagai tempat melakukan peribadatan ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam kesehariannya masjid berfungsi sebagai tempat shalat, pengajian dan lain sebagainya. Sedangkan melihat masjid secara sosiologis, dapat dilihat dari stuktur yang ada di dalamnya. Sebagai institusi keagamaan yang tidak mungkin berdiri sendiri, masjid memiliki kepengurusan di dalamnya. Dalam kepengurusan tersebut terdapat, misalnya saja ketua takmir, penasehat, bendahara, dan sie-sie tertentu.

Sebagai struktur dalam suatu masjid, pengurus tersebut memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. Penasehat dan ketua takmir lebih mempunyai kekuatan untuk menentukan kebijakan masjid jika dibanding dengan pengurus lain. Penasehat dan ketua takmir tersebut juga lebih memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat. Sedangkan sie-sie dalam suatu kepengurusan lebih sebagai pekerja maupun perancang program-program.

Akar dari perbedaan dan konflik yang muncul seputar perayaan Idul Fitri di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, terkait erat dengan pemuka agama dan pengurus-pengurus masjid. Meskipun jumlah mereka minoritas, namun mereka memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan-kebijakan masjid. Karena itulah, baik pemuka agama, pengurus masjid atau takmir masjid, dapat dikatakan sebagai elit-elit agama di dalam masyarakat.

Istilah elit pertama-tama menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial⁴. Kata “elit menurut penelusuran T.B. Bottomore muncul pertama kali pada abad ketujuh belas yang pada waktu itu digunakan untuk menggambarkan barang-barang dengan kualitas bagus. Kemudian Vilfredo Pareto memberikan gambaran tentang elit ; setiap individu memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam setiap cabang kegiatan manusia, bagi individu yang memiliki indeks tertinggi pada kegiatan-kegiatan tersebut maka ia disebut “elit”, konsep ini menjadi titik awal bagi definisi elit yang memerintah.⁵ Elit dibagi dua : kelas yang berkuasa (governing class) yang secara langsung maupun tidak memainkan peran penting dalam mekanisme kekuasaan politik, dan elit yang tidak berkuasa (non governing elite) terdiri dari orang-orang yang terampil tapi tidak terlibat dalam proses politik.⁶

M. Alfian memberikan definisi elit secara lebih singkat yaitu orang yang berada pada puncak piramida, mereka yang mempunyai pengaruh dan

⁴ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit*, terj. Zahara D. Noer (Jakarta: CV.Rajawali, 1984), hlm. 3.

⁵ T.B. Bottomore, *Elite dan Masyarakat*, terj. Abdul Haris dan Sayid Umar (Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006), hlm. 1.

⁶ Henri J. Schmandt, *Filsafat Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 640.

menentukan. Mereka bukan orang biasa karena posisi dan pengaruhnya tersebut.⁷ Lipset dan Solari memberikan pengertian elit sebagai berikut, yang dimaksud dengan elit adalah posisi dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama dan lain-lainnya.⁸

Dari beberapa pengertian mengenai elit di atas, maka penulis perlu membatasi terlebih dahulu pengertian elit dalam lingkup permasalahan yang menjadi tema penulis. Elit agama yaitu orang atau individu yang berada pada puncak struktur keagamaan di wilayah tertentu (dalam hal ini wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati) yang dengan posisinya tersebut akan membuatnya memiliki pengaruh, wewenang, dan menentukan. Sehingga dalam kasus ini elit agama tidak hanya terbatas pada ketua takmir masjid saja, namun lebih pada pengertian, mereka-mereka yang mempunyai kekuatan untuk menentukan langkah kebijakan masjid, misalnya saja; penasihat, dan sebagainya. Jika dilihat dari segi jumlah maka elit merupakan kelompok minoritas, karena yang dapat dikatakan sebagai elit hanyalah orang-orang terpilih.

Selanjutnya pembahasan dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep tentang kekuasaan, kepentingan, dan kelompok sosial. Mengenai kekuasaan, Max Weber mendefinisikannya sebagai kesempatan bagi seseorang atau sekumpulan orang untuk mewujudkan kehendak mereka dalam suatu

⁷ M Alfian Alfian M, *Relevansi Studi Elit di Indonesia* (Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006), hlm. Iv.

⁸ Amirul Fajar Rudiati, *Lembaga Swadaya Masyarakat dan Elit Lokal; Suatu Tinjauan Tentang Hubungan Antara LPTP dan Elit Lokal di Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Jawa Tengah Dalam Upaya Memperoleh Dukungan Kelompok Sasaran*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, (Yogyakarta, 2004), hlm. 64-65.

tindakan komunal bahkan jika tindakan itu ditujukan untuk mengatasi perlawanan pihak lain yang berpartisipasi dalam tindakan itu.⁹

Ada pergeseran pusat kekuasaan elit dari pusat kekuasaan khusus kepada pusat kekuasaan umum. Pusat kekuasaan umum tersebut dapat dimaknai pada keberadaan PAMUKTI sebagai wadah pengkoordinir masjid. Sedangkan pusat kekuasaan khusus diwakili pada keberadaan masjid-masjid di Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Apabila masyarakat bertambah besar dan kompleks maka di samping pusat kekuasaan umum timbul berbagai pusat kekuasaan khusus dalam masyarakat¹⁰.

Keadaan masyarakat Pedukuhan Ngemplak Karangjati ketika hanya terdapat satu masjid sampai masa awal berdirinya berdirinya masjid-masjid baru merupakan masyarakat yang bersifat paguyuban. Sifat kepaguyuban masyarakat tersebut ditandai solidaritas yang terbentuk lebih secara mekanis. Sedangkan perubahan masyarakat selanjutnya mengindikasikan kearah terbentuknya solidaritas organis.

Apabila masyarakat bertambah besar dan kompleks maka di samping pusat kekuasaan umum timbul berbagai pusat kekuasaan khusus dalam masyarakat. Dengan demikian timbul solidaritas organis dalam arti bahwa pusat kekuasaan umum atau *rulling elite* tidak lagi dapat berhubungan langsung dengan anggota masyarakat, yaitu dalam hal ini pusat-pusat kekuasaan khusus atau *strategic elite* tadi¹¹.

Munculnya masjid-masjid baru seiring pula dengan perubahan masyarakat. Solidaritas organis yang terbentuk dalam masyarakat menjadi pemicu terbentuknya pusat kekuasaan khusus disamping adanya pusat kekuasaan umum.

⁹ Max Weber, *Sosiologi*, terj; Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 217.

¹⁰ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit* (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. VI.

¹¹ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit*, hlm. VI.

Karena itulah masjid-masjid baru tersebut kemudian menjadi pusat kekuasaan khusus dari para elit agama.

Pusat kekuasaan umum atau yang disebut Keller sebagai *rulling elite* tersebut dapat berfungsi dengan baik ketika masyarakat Ngemplak Karangjati bersifat paguyuban dan solidaritas yang terbangun adalah solidaritas mekanis. Perubahan masyarakat yang terjadi begitu cepat, mengubah solidaritas tersebut menjadi solidaritas organis. Pada kondisi ini masjid-masjid sebagai *strategic elite*, mencapai puncak kekuatannya. Kesepakatan yang sebelumnya tercapai pada tataran *rulling elite*, menjadi hal yang tidak disepakati lagi pada tataran *strategic elite*.

Adanya perbedaan persepsi diantara elit-elit agama Pedukuhan Ngemplak Karangjati dalam mensikapi permasalahan seputar penyelenggaraan Sholat Ied ini kemudian memungkinkan munculnya konflik. Disatu sisi terdapat elit yang memepertahankan kesepakatan pada tingkat *rulling elite* (PAMUKTI), sedangkan disisi lain terdapat elit pada tingkat *strategic elite* (masjid) yang mempunyai kesepakatan baru dan berbeda dari kesepakatan sebelumnya.. Mengenai konflik dan penyebabnya Soeryono Soekanto menyatakan bahwa konflik merupakan salah satu bentuk dari proses sosial. Konflik bisa muncul dengan berbagai sebab antara lain perbedaan kepentingan, perbedaan ras dan budaya, perbedaan pendirian.¹²

Konflik menurut Lewis Coser tidak selalu mempunyai makna konotatif dan destruktif sebagaimana yang dianggap teoritisi fungsionalisme. Konflik juga mempunyai dampak positif, lebih jauh ia mengatakan bahwa konflik tersebut memiliki fungsi sosial. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme

¹² Soeryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2001), hlm. 107-108.

lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya dapat terbentuk dan dipertahankan. Konflik juga mencegah suatu pembekuan sistem sosial dengan mendesak adanya inovasi dan kreatifitas. Karena konflik lebih banyak dilihat dari segi fungsi positifnya, maka teori konflik yang dikembangkan Coser disebut pula *Fungsionalisme Konflik Sosial*.¹³

Konflik sering memperkuat dan mempertegas batas kelompok dan meningkatkan penggalangan solidaritas internal kelompok. Konflik antar kelompok merupakan penghadapan antara *in-group* dan *out-group*. Ketika konflik terjadi, masing-masing anggota dalam suatu kelompok akan meningkatkan kesadaran sebagai sebuah kelompok (*in-group*) untuk berhadapan dengan kelompok lain (*out-group*). Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial lainnya. Ketika ada ancaman dari luar, maka kelompok tidak mungkin memberikan toleransi pada perselisihan internal. Perpecahan yang terjadi di Pedukuhan Ngemplak Karangjati memungkinkan munculnya *in-group* dan *out-group* tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis yang bersifat deskriptif analisis. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang

¹³ Bryan S. Turner, *Agama dan Teori Sosial* (Yogyakarta: iRCiSoD, 2006), hlm. 48.

kompleks dengan cara memisahkan tiap-tiap bagian dari keseluruhan fokus yang dikaji atau memotong tiap-tiap adegan atau proses dari kejadian sosial atau kebudayaan yang sedang diteliti.¹⁴

Dari data-data yang diperoleh akan dikelompokkan atau dibagi dalam beberapa sub proses atau kejadian-kejadian. Pembagian data dalam sub-sub yang lebih kecil ditujukan agar lebih memungkinkan peneliti untuk melihat dan kemudian mendiskripsikan secara lebih detail suatu permasalahan. Pendiskripsian sub-sub yang lebih kecil tersebut dimaksudkan agar peneliti kemudian lebih memahami secara keseluruhan permasalahan yang ada.

Sedangkan untuk mengumpulkan data digunakan teknik :

1. Observasi

Observasi yang dilakukan yaitu observasi partisipatoris dan non partisipatoris. Observasi partisipatoris diartikan bahwa peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan obyek penelitian, sedangkan observasi non partisipatoris diartikan bahwa peneliti tidak terlibat secara langsung, melainkan mengamati dengan seksama terhadap kegiatan obyek ataupun masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai kelengkapan dari observasi. Wawancara ditujukan kepada informan yang dianggap relevan atau dapat memberikan data-data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

¹⁴ Moh Soehada, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hlm. 63.

Wawancara dilakukan dengan cara *unstructure interview*, yakni mengajukan pertanyaan secara bebas tanpa terikat oleh pertanyaan tertulis. Hal ini dimaksudkan selain agar wawancara lebih berjalan luwes dan terbuka, juga karena dikhawatirkan pada beberapa informan, sesi wawancara akan lebih emosional dan sensitif. Keadaan yang lebih emosional dan sensitif tersebut dikarenakan anggapan peneliti akan adanya konflik yang sifatnya latent dalam permasalahan penelitian ini, selain itu mengingat juga bahwa peneliti juga merupakan warga Pedukuhan Ngemplak Karangjati.

Namun meskipun wawancara yang dilakukan, merupakan wawancara bebas, pewawancara juga menyiapkan daftar pertanyaan secara tertulis. Daftar pertanyaan tersebut sekedar menjadi pegangan bagi pewawancara agar jalannya wawancara dapat lebih terfokus.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak sembilan orang. Jumlah tersebut sudah diproposionalkan dari segi tempat, umur, juga kedudukannya dalam masyarakat. Dari segi tempat, informan tersebut telah mewakili wilayah objek penelitian, khususnya terkait wilayah tiga masjid yaitu Masjid Shirothol Mustaqim, Masjid Mujahadah, dan Masjid Sabilul Muttaqin. Dari segi umur, kesembilan orang tersebut telah mewakili; *sesepeuh* (orang yang dituakan), bapak-bapak, dan pemuda. Sedangkan dari segi kedudukannya di masyarakat, informan tersebut mencakup; tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

Secara resmi, memang hanya terdapat sembilan orang informan saja, namun demikian, informasi juga banyak didapatkan dari ”informan tidak resmi”, yang sifatnya *insidental* dan tidak terencana. Hal ini dimungkinkan,

karena peneliti telah lama berdomisili di wilayah yang menjadi objek penelitian. Hanya saja, untuk informan tidak resmi tersebut, dalam hal waktu, tanggal, serta hasil wawancara tidak terdokumentasikan secara tertulis.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data dari buku-buku, majalah, artikel dan sebagainya. Selain itu termasuk juga data-data dari instansi terkait, misalnya data kependudukan, keagamaan, buku administrasi, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab pembahasan, disertai dengan sub-subnya. Pada bab I akan dibahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Pada bab II akan dibahas mengenai deskripsi daerah penelitian, dalam hal ini yaitu Pedukuhan Ngemplak Karangjati Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta. Selanjutnya, pada bab III akan dibahas mengenai masjid serta perbedaan yang terjadi dalam masyarakat seputar dinamika perayaan Idul Fitri di Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Kemudian bab IV akan berbicara mengenai elit dan konflik yang terjadi tersebut. Yang terakhir, pada bab V berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Kelurahan Sinduadi merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Mlati Propinsi Sleman Yogyakarta. Wilayah ini terdiri dari 18 Dusun, 62 Rukun Warga, dan 174 Rukun Tetangga. Kelurahan Sinduadi ini memiliki luas wilayah kurang lebih 737 Ha.

Pedukuhan Ngemplak Karangjati merupakan salah satu Dusun yang terletak di Kelurahan Sinduadi. Secara topografis, Pedukuhan Ngemplak Karangjati berada pada ketinggian kurang lebih 120 meter dari permukaan air laut. Batas teritorial Pedukuhan Ngemplak Karangjati di sebelah barat berbatasan dengan kampung Mesan dan Karanganyar, sebelah utara berbatasan dengan Desa Popongan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pogung, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Blunyah Gede.

Pedukuhan Ngemplak Karangjati ini dapat dikatakan terletak di pinggiran Kabupaten Sleman. Tepatnya berada di pinggiran Kabupaten Sleman sebelah selatan. Hal tersebut dikarenakan letak perbatasan antara Kabupaten Sleman dengan Kotamadya Yogyakarta, hanya berada sekitar 500 meter ke arah Selatan dari Pedukuhan Ngemplak Karangjati ini. Batas antara Kabupaten Sleman dengan Kotamadya Yogyakarta tersebut ditandai dengan didirikannya sebuah gapura, yang berada diantara Jalan Monumen Jogja Kembali dan Jalan A.M. Sangaji.

Terdapat dua sungai besar yang mengalir di sekitar wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Dua sungai tersebut yaitu Sungai Code dan Sungai Buntung. Sungai Code mengalir di sepanjang sisi sebelah timur wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati, yang menjadi batas antara wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati dengan Desa Pogung. Sedangkan Sungai Buntung yang mengalir di sebelah barat ini, menjadi batas antara Pedukuhan Ngemplak Karangjati dengan Kampung Karanganyar.

Keberadaan kedua sungai tersebut sering dimanfaatkan oleh beberapa warga Pedukuhan Ngemplak Karangjati untuk mencari ikan. Pencarian ikan tersebut bukan merupakan mata pencaharian, namun lebih pada penyaluran hobi ataupun sekedar mengisi waktu luang. Pencarian ikan biasanya dilakukan dengan menggunakan kail, jala, potasium dan listrik. Pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, kawasan Sungai Code di sekitar wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati, dibangun sebagai proyek pengendalian banjir lahar Gunung Merapi. Sejak dibangunnya kawasan sungai Code tersebut, pencarian ikan dengan listrik dan potasium di sungai ini, secara tertulis telah dilarang penggunaannya.

Selain kedua sungai tersebut, diwilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati ini mengalir pula sebuah selokan, yakni Selokan Mataram. Selokan ini mengalir melintasi wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati, tepatnya wilayah pinggiran sebelah Utara. Dari selokan ini, bercabang sebuah parit kecil, yang dalam bahasa jawa, masyarakat lebih sering menyebutnya dengan istilah *kalen*. Parit kecil ini mengalir melintas di tengah-tengah wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati dari ujung utara hingga ke ujung selatan.

Aliran air dari parit kecil ini banyak digunakan oleh warga di sekitar parit untuk membuat kolam ikan. Kolam-kolam yang ada tersebut tidak hanya dibuat untuk sekedar memelihara ikan saja, namun ada beberapa warga yang memanfaatkan kolam yang dibuatnya tersebut untuk membuka jasa pemancingan. Setidaknya sampai saat ini terdapat tiga buah pemancingan di wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Selain itu, keberadaan parit kecil ini menjadi sumber utama irigasi area persawahan yang ada di wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati dan sekitarnya.

Parit kecil ini tidak secara keseluruhan terbuka, namun pada beberapa tempat mengalir secara tertutup dibawah tanah. Adanya sampah yang dibuang di parit ini terkadang membuat parit menjadi mampet, sehingga sering menyebabkan banjir. Meskipun banjir yang diakibatkan tidak terlalu tinggi, namun cukup merepotkan para pengguna jalan. Usaha penanggulangan sampah dengan membuat beberapa sekat penyaring sampah di beberapa tempat, kurang begitu efektif. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya petugas khusus yang bertugas membersihkan sampah yang telah tersaring. Keadaan ini membuat beberapa sekat yang sebelumnya telah terpasang kemudian dilepas kembali. Sedangkan usaha untuk memperlebar saluran parit terkendala oleh saluran parit yang berada di bawah tanah. Bahkan, pada beberapa tempat telah didirikan bangunan permanen diatasnya.

Disebelah selatan wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati ini membentang area persawahan yang cukup luas, meskipun selama beberapa *dasa warsa* terakhir ini, area persawahan telah banyak berkurang. Saat ini, area persawahan yang ada di dalam wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati hanya

tinggal 3 petak saja, selebihnya area persawahan berada di wilayah Kampung Blunyah Gede, Kampung Mesan dan Kampung Karangwaru. Berkurangnya area persawahan tersebut dikarenakan telah didirikannya beberapa bangunan di area persawahan yang ada. Di wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati, areal persawahan yang ada, selain karena didirikan rumah tinggal, didirikan pula perumahan, pemancingan, lapangan, dan tempat usaha berupa warung makan.

Pada sekitar tahun 2003, parit yang digunakan untuk mengairi areal persawahan tidak mengalir selama beberapa bulan. Berhentinya aliran tersebut dikarenakan adanya perbaikan di Selokan Mataram. Kondisi yang demikian ini membuat para pemilik sawah mengganti tanaman padi mereka dengan tanaman lain yang tidak membutuhkan begitu banyak air. Beberapa tanaman yang menjadi alternatif pada saat itu yaitu; tembakau, cabai, bawang merah, semangka dan melon. Kondisi tanah yang kering inilah yang kemudian banyak menarik orang untuk mendirikan bangunan di areal persawahan tersebut.

Secara umum, prasarana fisik di Pedukuhan Ngemplak Karangjati sudah cukup baik. Hampir semua jalan di Pedukuhan ini telah diaspal, dikonblok, ataupun disemen. Pedukuhan ini merupakan pedukuhan yang sedang berkembang, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pendirian bangunan-bangunan baru di beberapa tempat.

Banyaknya pembangunan tersebut sering memunculkan beberapa permasalahan, terutama berkaitan dengan pemeliharaan jalan. Truk-truk besar pembawa material bangunan yang keluar masuk wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati, sering kemudian merusak jalan. Hal ini dikarenakan memang beberapa jalan yang ada tidak dibuat untuk menanggung beban yang berat.

Beberapa kerusakan jalan yang sering ditimbulkan yaitu berlubangnya jalan, bahkan pernah terjadi sampai meruntuhkan lubang resapan air. Untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut, biasanya dilakukan dengan swadaya warga. Namun jika kerusakan yang ditimbulkan terlalu parah, tak jarang kemudian warga melalui pengurus RT/RW menuntut kepada mandor bangunan untuk bertanggung jawab memperbaiki jalan yang rusak tersebut.

Hal ini pernah dialami oleh Pn, seorang mandor bangunan yang telah beberapa kali membangun proyek di wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Saat itu, Pn kemudian memberikan bantuan berupa semen dan pasir untuk perbaikan jalan, yang pengerjaannya dilakukan secara gotong-royong oleh warga.

Letak Pedukuhan Ngemplak Karangjati yang berada diantara dua jalan raya, yaitu Jalan Monumen Jogja Kembali dan Jalan Magelang, membuat sarana transportasi umum mudah ditemukan. Jalan Monumen Jogja Kembali membelah wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati menjadi dua bagian, yaitu bagian timur dan barat. Wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati yang berada di timur jalan Monumen Jogja Kembali hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Wilayah ini kemudian sering disebut oleh warga dengan nama Karangjati Wetan (timur). Selain kedua jalan besar tersebut, terdapat pula jalan yang menghubungkan antara Jalan Monumen Jogja Kembali dengan Jalan Magelang. Jalan tersebut melintas di sepanjang tepi selatan wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Keberadaan jalan ini menjadi pembatas antara Pedukuhan Ngemplak Karangjati dengan kampung Blunyah Gede. Dengan adanya jalan ini, maka semakin mempermudah warga untuk mendapatkan sarana transportasi umum. Beberapa armada transportasi umum yang dapat dengan

mudah diakses dari ini diantaranya; Kobutri Jalur 14, Koperasi Pemuda Jalur D-2, D-21, D-29, A-III, dan RAS (Rukun Agawe Santoso).

B. Keadaan Penduduk

Secara administratif penduduk di kelurahan Sinduadi pada tahun 2007 berjumlah sebanyak 32000 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka jumlah penduduk di kelurahan Sinduadi ini mengalami kenaikan. Pada tahun 2006, penduduk di wilayah kelurahan Sinduadi tercatat berjumlah 30.000 jiwa. Dengan kata lain dalam jangka 1 tahun, penduduk di wilayah Kelurahan Sinduadi mengalami kenaikan sebanyak 2000 jiwa.

Secara lebih jelas, keadaan penduduk di wilayah kelurahan Sinduadi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Tabel Keadaan Penduduk
Di Kelurahan Sinduadi Mlati Sleman

No	Tahun	Jumlah
1	2006	30.000
2	2007	32.000

Data: Monografi Kelurahan Sinduadi

Jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Sinduadi tersebut tentunya tidak seperti kondisi riil yang ada. Di Pedukuhan Ngemplak Karangjati misalnya, menurut pengamatan penulis banyak terdapat warga yang berdomisili di wilayah ini tanpa mengurus data-data administratif. Hal tersebut banyak dilakukan oleh warga pendatang yang mengontrak rumah ataupun yang kost di wilayah

Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Waktu tinggal yang sementara serta anggapan bahwa tidak adanya kepentingan secara langsung untuk mengurus data administratif, menjadi beberapa alasan utama. Misalnya saja seperti diungkapkan Ty, yang kurang lebih telah 2 tahun tinggal di wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati, namun sampai sekarang belum melapor ke pengurus RT setempat.

Bagi warga sekitar, kehadiran warga yang kost memang tidak dilihat secara administratif dalam buku kependudukan. Keberadaan warga yang kost, lebih dilihat dari segi keaktifan mereka dalam kegiatan kampung, seperti kerja bakti, kegiatan perondaan, pengajian dan lain sebagainya. Selain itu, perilaku dan sopan-santun warga pendatang juga dijadikan penilaian tersendiri bagi warga sekitar.

Pengurusan data administratif oleh warga pendatang, lebih banyak bergantung pada peran aktif dari pengurus RT setempat. Artinya, banyak warga pendatang yang mengurus data administratif jika warga tersebut didatangi oleh pengurus RT setempat. Bagi pendatang yang mengontrak rumah lebih sering didatangi oleh pengurus RT dibandingkan dengan pendatang yang kost. Hal ini dikarenakan pendatang yang mengontrak rumah lebih terlihat keberadaannya daripada pendatang yang kost. Selain itu, pendatang yang mengontrak rumah dianggap lebih memiliki kepentingan langsung bagi pengurus RT. Kepentingan tersebut misalnya saja seperti; iuran bulanan wajib, kegiatan perondaan, dan pertemuan warga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Sering luputnya penghuni kost dari perhatian pengurus, membuat beberapa kepengurusan RT membentuk sie khusus untuk memantau warga yang berstatus kost. Misalnya saja

kepengurusan di RT: 08/RW: 038, yang menunjuk seseorang, khusus untuk mengurus warga yang berstatus kost.

C. Pendidikan

Pembagian penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Sinduadi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kelurahan Sinduadi Mlati Sleman Tahun 2007

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	4.371	14,6 %
2	SLTP	3.969	13,2 %
3	SLTA	16.900	56,3 %
4	D1-D3	2.562	8,5 %
5	S1	2.150	7,1 %
6	S2	78	0,3 %
Jumlah		30.030	100 %

Data : Monografi Kelurahan Sinduadi

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Kelurahan Sinduadi, dengan tingkat pendidikan SLTA merupakan penduduk yang paling banyak. Penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 16.900 orang, atau sebanyak 56 % dari seluruh jumlah penduduk Kelurahan Sinduadi. Selanjutnya,

diikuti jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan sampai SD, yaitu sebanyak 4.371 orang atau sebanyak 14,6 %. Sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan S2, hanya sebanyak 78 orang atau hanya 0,3 % saja.

Sarana pendidikan yang ada di dalam wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati yakni; TK Aisyiah Bustanul Atfal, TK Dharma Bhakti dan SMU Binatama. TK ABA tersebut sebelumnya berada di wilayah kampung Blunyah Gede, yang kemudian pada tahun 2005 pindah kedalam wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. TK ABA ini terletak di pinggiran selatan wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati, tepat di tepi jalan perbatasan antara Pedukuhan Ngemplak Karangjati dengan kampung Blunyah Gede. Sedangkan TK Dharma Bhakti berada di tengah-tengah wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Keberadaan TK ABA dan TK Dharma Bhakti ini banyak dimanfaatkan oleh warga Pedukuhan Ngemplak Karangjati untuk menyekolahkan anaknya. Selain letaknya yang dekat, mutu pendidikan di TK tersebut, khususnya TK ABA terbilang cukup Bagus. Secara interpretasi keagamaan, dapat dikatakan bahwa TK Dharma Bhakti lebih identik dengan TK Kristen, sedangkan TK ABA lebih identik dengan Islam. Karena itulah TK Dharma Bhakti lebih menjadi pilihan bagi warga yang memiliki kepercayaan non Islam, demikian pula sebaliknya. Sarana pendidikan lainnya yaitu SMU Binatama, merupakan SMU swasta dengan status disamakan.

Sarana pendidikan lain yang berada tidak jauh dari wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati, yakni; SD Muhammadiyah Blunyah Gede, SD Petinggen, SD Impres Karangwaru, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Rogoyudan. Kemudian sarana pendidikan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama atau

yang sederajat terdapat Madrasah Tsanawiyah Negeri I Rogoyudan. Untuk sarana pendidikan pada jenjang Sekolah menengah Umum atau yang sederajat terdapat SMU Dr Wahidin, SMU 4 Yogyakarta dan Madrasah Aliyah Negeri III. Sedangkan pada tingkat Perguruan Tinggi, terdapat Akademi Administrasi Negara Notokusumo, dan Akademi Maritim Yogyakarta.

Banyaknya perguruan tinggi di sekitar wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati memberikan keuntungan tersendiri bagi warga Pedukuhan Ngemplak Karangjati, khususnya keuntungan secara ekonomi. Banyak warga yang kemudian mendirikan tempat-tempat kost, yang banyak menjadi pilihan tempat tinggal bagi mahasiswa yang mayoritas merupakan pendatang. Selain itu banyak pula warung-warung makan dengan konsumen utama warga yang kost.

Letak Nemplak Karangjati diantara dua jalan raya, yaitu Jalan Monjali dan Jalan Magelang, bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi warga pendatang untuk tinggal di wilayah ini. Letak yang strategis tersebut memberikan kemudahan bagi warga setempat untuk melakukan mobilitas ke berbagai arah. Banyak kampus-kampus besar yang dapat dengan mudah diakses melalui ini. Terlebih lagi setelah dibangun jembatan Prof. Ir. KRMT. Wreksodiningrat, yang melintasi sungai code, dan menghubungkan wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati dengan wilayah Desa Pogung. Keberadaan jembatan ini membuat akses menuju dua kampus besar, seperti UGM dan UNY menjadi semakin dekat.

D. Mata Pencarian

Pembagian penduduk berdasarkan mata pencarian di Kelurahan Sinduadi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Keadaan Peduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Kelurahan Sinduadi Mlati Sleman Tahun 2007

N o	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri	2.230	28 %
2	Pegawai Swasta	2.134	27 %
3	ABRI/POLRI	64	1 %
4	WIRASWASTA	950	13 %
5	Tani	617	7 %
6	Buruh Tani	275	4 %
7	Pertukangan	1.315	16 %
8	Lain-lain	274	4 %
Jumlah		7.859	100 %

Data : Monografi Kelurahan Sinduadi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Kelurahan Sinduadi, mayoritas bermatapencaharian sebagai Pegawai Negeri, yaitu sebanyak 2.230 orang, atau sebanyak 28 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Kemudian diikuti oleh penduduk yang bermatapencaharian sebagai pegawai swasta, yaitu sebanyak 2.134 orang atau sebanyak 27 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk yang menjadi anggota ABRI dan POLRI, tergolong paling minim, yaitu hanya sebanyak 64 orang, atau hanya 0,8 % dari keseluruhan jumlah penduduk Kelurahan Sinduadi.

Di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, menurut pengamatan sementara penulis banyak terdapat usaha kecil tingkat rumah tangga, atau *home industry*. Usaha pada tingkat rumah tangga tersebut diantaranya; jahit, bengkel, dan produksi makanan ringan. Untuk usaha jahit misalnya, milik Hj di RT 08, milik Tt dan My di RW 40, juga usaha jahit milik Id. Banyaknya usaha jahit tersebut tidak kemudian menjadikan adanya suatu persaingan yang berarti. Hal tersebut dikarenakan letak usaha-usaha jahit tersebut cenderung merata dan sebagian

terbilang hanya sekedar menjadi usaha sambilan. Memang terdapat beberapa usaha jahit yang sangat berdekatan, misalnya usaha jahit milik My dan Tt, namun masing-masing memiliki konsumen tersendiri. Usaha jahit milik Tt lebih mengkhususkan pada jahit kaos, sedangkan usaha jahit milik My lebih untuk umum.

Usaha kecil lainnya, yaitu bengkel. Saat ini, paling tidak terdapat empat buah bengkel mobil dan tiga buah bengkel sepeda motor di Pedukuhan Ngemplak Karangjati ini. Empat bengkel mobil tersebut, diantaranya yaitu ; milik Sl, yang ada di wilayah RW: 038, milik Sn di RW 40, milik St di RW 36, dan milik Pr di RW 42. Usaha bengkel mobil milik Sl dan Pr lebih dikhususkan pada bengkel kenteng/cat mobil. Bengkel mobil milik St, lebih mengkhususkan pada mesin. Sedangkan bengkel mobil milik Sn, selain menerima kenteng/cat mobil, juga menerima servis mesin. Usaha bengkel milik Sn dapat dikatakan, merupakan bengkel paling besar diantara empat bengkel mobil yang ada tersebut.

Di Pedukuhan Ngemplak Karangjati terdapat sebuah pabrik kerupuk. Pabrik tersebut terletak di RW: 038, tepatnya berada di wilayah RT: 09. Pabrik kerupuk yang merupakan milik Sm tersebut, banyak menyerap tenaga kerja. Selain warga di sekitar pabrik, banyak juga pekerja yang berasal dari luar Yogyakarta. Pekerja pendatang tersebut banyak berasal dari Jawa Barat. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya yaitu, pemilik pabrik merupakan warga pendatang yang berasal dari Jawa Barat. Para pekerja pendatang tersebut banyak yang kemudian menetap di sekitar pabrik dengan mengontrak rumah. Dengan begitu, maka keberadaan pabrik tersebut dapat dikatakan berdampak pada bertambahnya

jumlah penduduk di wilayah Pedukuhan Pedukuhan Ngemplak Karangjati, khususnya di wilayah RT 09.

Selain memproduksi kerupuk, di pabrik tersebut juga diproduksi makanan ringan lain, seperti makaroni dan lain sebagainya. Meskipun tidak sebanyak produksi kerupuk, produksi makanan ringan ini juga cukup menyerap tenaga kerja. Jika dalam produksi kerupuk lebih banyak memperkerjakan tenaga kerja pria, produksi makanan ringan seperti makaroni, yang lebih banyak didominasi oleh tenaga kerja wanita.

Produksi makanan ringan lain, dalam lingkup usaha yang lebih kecil, misalnya saja; produksi makanan ringan berupa bakso goreng. Usaha bakso goreng ini berada di RT 10 RW 38, bertempat di rumah Bs. Usaha produksi makanan ringan ini juga mampu menyerap tenaga kerja, meskipun tidak sebanyak di pabrik kerupuk. Selain itu tenaga kerja yang terserap juga masih terbatas pada orang-orang di sekitar rumah Bs saja, yang notabene masih mempunyai hubungan saudara dengan Bs. Saat penulis berkunjung di rumah Bs tersebut, terlihat aktifitas empat orang ibu-ibu yang sedang membungkus bakso goreng.

E. Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk Pedukuhan Ngemplak Karangjati Kelurahan Siduadi Mlati Sleman beragama Islam. Secara kuantitatif, penduduk Kelurahan Sinduadi yang beragama Islam pada tahun 2007, yaitu sebanyak 26.817 orang, dari 32000 jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Sinduadi, atau sebanyak 83,80% dari seluruh jumlah penduduk. Sedangkan sisanya sebanyak 5.183 orang, atau 16,20% beragama non Islam.

Secara lebih jelas pembagian penduduk Kelurahan Sinduadi didasarkan pada agama, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Keadaan Peduduk Kelurahan Sinduadi
Berdasarkan Agama, Tahun 2007

No	Agama	Laki-Laki	Dalam %	Perempuan	Dalam %
1	Islam	11.006	83,61 %	15.811	89,97 %
2	Kristen	1004	7,62 %	915	5,20 %
3	Katolik	989	7,51 %	782	4,45 %
4	Hindu	102	0,77 %	38	0,21 %
5	Budha	61	0,46 %	27	0,15 %
jumlah		13.162	100 %	17.573	100 %

Data : Monografi Kelurahan Sinduadi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang beragama Islam dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 mengalami kenaikan sebanyak 11 orang. Kenaikan penduduk yang beragama Islam tersebut lebih banyak dari kalangan penduduk berjenis kelamin perempuan. Kenaikan tersebut terdiri dari 1 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Kemudian penduduk yang beragama Kristen mengalami kenaikan sebanyak 6 orang, yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Sedangkan untuk penduduk yang beragama Katolik mengalami kenaikan sebanyak 2 orang yang hanya terdiri dari penduduk berjenis kelamin perempuan saja. Sebaliknya, penduduk yang beragama Hindu bertambah 1 orang, yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki saja. Penduduk yang beragama Budha tidak mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 61 orang laki-laki dan 27 orang perempuan.

BAB III

MASJID DAN PERBEDAAN

SEPUTAR PERAYAAN IDUL FITRI

A. Masjid dan Masyarakat

Pembicaraan mengenai Masjid ini menjadi penting ketika akan melihat keberadaan elit. Sebelumnya di Pedukuhan Ngemplak Karangjati hanya terdapat satu buah masjid saja, yaitu Masjid Mujahadah. Keadaan ini berlangsung lama sampai kemudian di Pedukuhan Ngemplak Karangjati berdiri empat masjid lainnya.

Selama di Pedukuhan Ngemplak Karangjati tersebut hanya terdapat satu buah masjid saja, perbedaan terkait penentuan 1 Syawal tersebut tidak pernah terjadi. Perbedaan tersebut terjadi di masyarakat Pedukuhan Ngemplak Karangjati setelah berdiri lima buah masjid. kaitannya dengan keberadaan elit yaitu bahwa ada perubahan konsentrasi elit seiring dengan munculnya masjid di pedukuhan ini. Elit yang sebelumnya terpusat menjadi terbagi dalam sub-sub tertentu dalam masyarakat melalui kemunculan masjid-masjid baru.

Kemunculan masjid-masjid baru di Pedukuhan Ngemplak Karangjati tersebut diiringi pula dengan bertambahnya kompleksitas masyarakat. Kompleksitas tersebut muncul dengan pertambahan penduduk yang kemudian memicu pula pada perubahan masyarakat. Apabila masyarakat bertambah besar

dan kompleks maka di samping pusat kekuasaan umum timbul berbagai pusat kekuasaan khusus dalam masyarakat¹.

Secara sosiologis keberadaan masjid memang tidak hanya dimaknai sebagai tempat melaksanakan ibadah saja. Sebagai institusi keagamaan, masjid memiliki struktur tertentu di dalamnya. Dalam struktur tersebut masing-masing mempunyai fungsi dan kewenangan tersendiri. Dari sinilah kemudian memungkinkan pada munculnya elit masjid. Namun sebelum jauh pada pembahasan mengenai elit terlebih dahulu akan dibahas masjid di Pedukuhan Ngemplak Karangjati secara umum.

1. Sejarah Masjid

Sebelum di Pedukuhan Ngemplak Karangjati berdiri banyak masjid, pembinaan keagamaan masyarakat sudah banyak dilakukan dalam bentuk pengajian-pengajian. Kegiatan pengajian tersebut tersebar di dalam wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Berawal dari kegiatan pengajian inilah kemudian di Ngemplak Karangjati dirintis berdirinya masjid-masjid.

Usaha untuk merintis berdirinya masjid-masjid di wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati tersebut dimulai pada sekitar tahun 1984. Bermula dari pengajian bapak-bapak Ngemplak Karangjati, dengan menggerakkan lembaga-lembaga kampung agar di pojok-pojok kampung dapat berdiri tempat ibadah yang fungsi utamanya yaitu untuk pembinaan

¹ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit* (Jakarta: Gratama Offset, 1984), hlm. IV

keagamaan masyarakat. Berberapa tokoh yang menjadi perintis awal yaitu; GP, KM, GY, PR, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya²

Beberapa hal yang menjadi alasan untuk mendirikan masjid di pojok-pojok kampung yaitu agar pembinaan keagamaan masyarakat lebih efisien, karena dengan demikian pembinaan tersebut selain lebih merata juga dapat menyentuh pada masyarakat yang ada di pinggiran wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Alasan lain dari didirikannya masjid di sudut-sudut wilayah Ngemplak Karangjati, yaitu sebagai benteng bagi masyarakat muslim dari pengaruh luar. Pengaruh tersebut misalnya saja dari usaha-usaha Kristernisasi dan lain sebagainya.

Sejak mulai dirintis pembangunan masjid-masjid di wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati pada sekitar tahun 1984, baru pada sekitar awal tahun 90-an telah berdiri keempat masjid lain setelah Masjid Mujahadah. Dalam membangun keempat masjid tersebut tidaklah dilakukan secara serentak, namun secara bergilir. Kelima masjid tersebut secara berurutan dari yang paling awal berdiri sampai yang terakhir, yaitu Masjid Mujahadah, Masjid Miftahul Huda, Masjid Sabilul Muttaqin, Masjid Shirothol Mustaqim, dan yang terakhir yaitu masjid Imadul Muslimin.

Masjid yang pertama kali dibangun setelah Masjid Mujahadah yaitu Masjid Miftahul Huda. Masjid ini berada di wilayah RW 41, dan terletak di tepi Jalan Monumen Jogja kembali, tepatnya di tepi sebelah Barat dari jalan ini. Masjid ini merupakan masjid dari wakaf keluarga Bp Sudarmaji. Jika dibanding dengan masjid lainnya, masjid ini merupakan masjid yang paling

² Wawancara dengan bapak Gp, Tokoh Agama Pedukuhan Ngemplak Karangjati, di Rumah Gp tanggal 24 Juni 2009.

kecil. Jika status sebagai masjid dipahami sebagai tempat ibadah yang sudah dipakai untuk ibadah Sholat Jum'at, maka Masjid Miftahul Huda ini belum dapat dikatakan sebagai masjid, karena memang masjid ini belum digunakan untuk Sholat Jum'at.

Setelah Masjid Miftahul Huda ini berdiri, kemudian selanjutnya berdiri Masjid Sabilul Muttaqin. Masjid ini berada di wilayah Ngemplak Karangjati tepatnya di RT: 03, RW: 36. Seperti halnya Masjid Miftahul Huda, Masjid Sabilul Muttaqin ini juga berdiri di tepi sebelah Barat dari Jalan Monumen Jogja Kembali, namun jarak kedua masjid ini memang berjauhan. Awal berdiri masjid ini merupakan hasil dari wakaf Ibu SK, dan ketika berdiri pertama kali, memang tidak langsung menjadi masjid melainkan masih berstatus sebagai mushalla. Barulah setelah beberapa tahun berdiri, mushalla ini kemudian berkembang menjadi masjid, setelah dibelinya tanah wakaf oleh jamaah.

Salah satu hal yang menarik dari pembangunan Masjid Sabilul Muttaqin ini yaitu, bahwa masjid ini dibangun sebanyak dua kali. Yang dimaksud dengan dibangun sebanyak dua kali disini yaitu setelah masjid ini berdiri dan digunakan untuk kegiatan keagamaan selama beberapa tahun, kemudian dirobohkan hingga rata dengan tanah dan kemudian dibangun kembali mulai dari awal. Selama Masjid Sabilul Muttaqin ini dirobohkan dan dibangun kembali, untuk sementara proses kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah dialihkan di salah satu rumah warga yang letaknya tidak jauh dari masjid tersebut. Rumah salah satu warga yang menjadi tempat kegiatan keagamaan sementara tersebut yaitu rumah dari Bapak Barman.

Pembangunan Masjid Sabilul Muttaqin untuk kedua kalinya tersebut tersebut dilakukan karena adanya bantuan dari organisasi BSM (Bulan Sabit Merah). Dengan adanya bantuan dari Bulan Sabit Merah tersebut, dan kebetulan memang sudah dianggap perlu untuk memperluas masjid, mengingat jika Sholat Jum'at, masjid sudah tidak cukup untuk menampung jamaah sehingga jika hujan akan merepotkan jamaah. Musyawarah untuk membangun kembali Masjid Sabilul Muttaqin ini dilaksanakan di salah satu rumah warga yang tidak jauh dari lokasi masjid, yaitu bertempat di rumah BY. Untuk pelaksanaan pembangunan masjid itu sendiri, “diborongkan” pada bapak NS, sedangkan untuk perancangan bangunan masjid dipercayakan kepada RS. Baik NS maupun RS merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi masjid.

Dari keterangan diatas didapatkan bahwa sebagai sponsor pembangunan Masjid Sabilul Muttaqin, Bulan Sabit Merah tidak terlalu ikut campur dalam masalah proses pembangunan. Meskipun terdapat sponsor, dalam membangun Masjid Sabilul Muttaqin tersebut, tidak terlepas pula dari swadaya masyarakat. Warga di sekitar masjid tidak hanya membantu dalam hal tenaga dan pikiran saja, namun juga memberikan bantuan berupa materil.

Penulis mendapatkan bahwa terdapat pro dan kontra terkait dengan pembangunan kedua kalinya dari masjid Sabilul Muttaqin ini. Beberapa tokoh agama, maupun tokoh masyarakat di Ngempalak Karangjati tidak menilai positif pembangunan kembali Masjid Sabilul Muttaqin Tersebut. Beberapa hal yang menjadi alasannya utama yaitu, pertama; pembangunan tersebut memutuskan rutinitas sholat jamaah di masjid, karena bangunan masjid

dirobohkan seluruhnya sehingga selama proses pembangunan, masjid tersebut sementara tidak digunakan untuk sholat jamaah. Kedua; adanya sponsor utama dari pihak luar, dalam hal ini adalah BSM. Adanya sponsor dari luar tersebut dikhawatirkan akan mengurangi rasa memiliki terhadap masjid itu sendiri, tidak saja bagi warga di sekitar masjid, namun juga bagi seluruh umat muslim di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, karena berbeda dengan bangunan masjid yang pertama, yang dalam proses pembangunannya sangat kental dengan nuansa gotong royong dan benar-benar mencerminkan kemandirian dan swadaya dari seluruh masyarakat muslim Ngemplak Karangjati.

Dipilihnya Masjid Sabilul Muttaqin oleh BSM untuk mendapatkan bantuan pembangunan masjid memang bukan tanpa alasan. Diungkapkan oleh KR, bahwa ada tiga syarat yang ditentukan oleh BSM bagi masjid yang hendak mendapatkan bantuan. Ketiga syarat tersebut yaitu, pertama; strategisnya lokasi masjid yang akan dibangun. Kedua; jarak dengan masjid lain, dan yang ketiga yaitu status dari bangunan tersebut.³

Jika ditinjau dari segi letak, Masjid Sabilul Muttaqin ini memang terhitung strategis, mengingat letaknya yang ada di tepi jalan besar. Kemudian jika dilihat dari segi jarak dengan masjid lain, meskipun letak Masjid Sabilul Muttaqin tidak terlalu jauh dengan Masjid Mujahadah, namun masih tetap masuk dalam kriteria. Hal tersebut dikarenakan, salah satu syarat berupa jarak yang berjauhan dengan masjid lain, diambil dengan suatu pertimbangan bahwa jika nanti salah satu masjid dibangun diharapkan tidak kemudian

³ Wawancara dengan KR, Pengurus Masjid Sabillul Muttaqin, di Masjid Sabilul Muttaqin tanggal 22 Mei 2009.

menimbulkan suatu kesenjangan, dan dikhawatirkan pula nantinya akan membagi jamaah.

Letak Masjid Sabilul Muttaqin yang ada di tepi jalan raya mejadikan jamaahnya tidak terbatas pada warga di sekitar masjid saja, sehingga kekhawatiran untuk menimbulkan adanya kesenjangan dan akan membagi jamaah, tidak akan terjadi atau kemungkinannya sangatlah kecil. Akan berbeda halnya jika Masjid Mujahadah yang dibangun. Letak Masjid Mujahadah yang ada di tengah perkampungan dikhawatirkan akan membagi jamaah dan menimbulkan kesenjangan, karena jamaahnya lebih terbatas pada masyarakat di sekitar masjid saja.

Syarat yang ketiga yaitu mengenai status dari bangunan tersebut. Bangunan yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pembangunan oleh BSM yaitu bangunan yang telah berstatus sebagai masjid. Bangunan yang dianggap termasuk pada kriteria sebagai masjid dalam hal ini, yaitu bangunan yang sudah dipakai untuk kegiatan ibadah Sholat Jum'at. Di wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati memang terdapat dua buah masjid yang letaknya ada di tepi Jalan besar, yaitu Masjid Sabulul Muttaqin dan Masjid Miftahul Huda. Namun demikian, jika melihat syarat ketiga ini, Masjid Miftahul Huda tidak termasuk dalam masjid yang dapat mendapat bantuan pembangunan karena pada saat itu, Masjid Miftahul Huda belum berstatus sebagai Masjid.

Masjid yang dibangun di wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati setelah Masjid Sabilul Muttaqin, yaitu Masjid Shirothol Mustaqim. Diungkapkan oleh SJ, bahwa awal berdirinya masjid Shirothol Mustaqim,

bermula dari kegiatan pengajian bapak-bapak yang semakin lama semakin berkembang dan semakin banyak jama'ahnya. Dari keadaan jamaah yang sudah semakin banyak ini, kemudian muncullah suatu gagasan, bahwa diperlukan suatu wadah untuk menampung jamaah yang berkembang pesat tersebut. Kemudian disepakatilah Untuk mendirikan sebuah tempat ibadah yang pada saat ini dikenal dengan nama Masjid Shirotol Mustaqim. Lebih lanjut diungkapkan oleh SJ bahwa pada awal berdirinya, Masjid Shirotol Mustaqim hanya seluas 110 meter persegi saja. Tanah seluas 100 meter persegi merupakan tanah wakaf dari jamaah, sedangkan 10 meter sisanya merupakan wakaf dari Bapak Suradi⁴.

Masjid Shirotol Mustaqim terletak di wilayah RT: 9, RW: 038 Ngemplak Karangjati. Pada masa awal berdirinya, Masjid Shirotol Mustaqim memang belum seluas seperti sekarang ini. Pada masa awal tersebut, bangunan Masjid Shirotol Mustaqim masih berstatus sebagai Mushalla.

Suatu hal yang menarik dari pembangunan Masjid Shirotol Mustaqim ini yaitu adanya pelaksanaan “peletakan batu bersama” saat akan memulai membangun fondasi. Pelaksanaan peletakan batu bersama ini menapak tilas dari kisah Nabi Muhammad SAW ketika menengahi pertikaian antara beberapa pemimpin suku di Mekah, yang pada saat itu bersitegang mengenai siapa yang berhak mendapat kehormatan untuk meletakkan batu pertama. Pelaksanaan peletakan batu bersama tersebut dilakukan dengan meletakkan batu-batu pada kain panjang, yang pada sepanjang tepi kain

⁴ Wawancara dengan bapak Sj, Sesepuh Pedukuhan Ngemplak Karangjati dan Pengurus salah satu Pengajian Bapak-bapak di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, di Rumah Sj tanggal 3 Juni 2009.

tersebut dipegang oleh jamaah yang berwakaf. Pembangunan masjid Shirothol mustaqim ini sendiri selesai pada tahun 1993.

Masjid Shirotol Mustaqim mengalami perluasan pada sekitar tahun 2002. Perluasan tersebut dilaksanakan setelah ada yang mewakafkan tanah yang ada di sebelah Timur masjid. Tanah tersebut sebelumnya merupakan halaman dari rumah warga yang dikelilingi tembok tinggi. Karena itulah setelah perluasan ini dilaksanakan, pintu masuk masjid bertambah satu lagi, yaitu dari arah Timur.

Perluasan bangunan masjid ini sangatlah efektif, jika mengingat keadaan Masjid Shirothol Mustaqim yang dikelilingi rumah penduduk. Rumah penduduk yang mengelilingi masjid shirohol ini memang menempel pada bangunan masjid, sehingga sebelum dilaksanakan perluasan tersebut jalan masuk ke masjid satu-satunya hanyalah dari arah Barat. Bagi jamaah yang berasal dari arah Timur harus berjalan jauh memutar terlebih dahulu, untuk masuk ke masjid ini. Efektifitas dari perluasan masjid ini dapat terlihat dari semakin makmurnya jamaah masjid, setelah adanya perluasan tersebut.

Perluasan Masjid Shirothol Mustaqim ini juga merupakan salah satu cikal bakal berubahnya status Masjid Shirothol Mustaqim yang sebelumnya masih sebagai musalla, kemudian menjadi berstatus sebagai Masjid. Setelah perluasan masjid selesai dilaksanakan pada sekitar tahun 2002, maka pada tahun 2006 mulailah Masjid Shirothol Mustaqim digunakan untuk Kegiatan ibadah Sholat Jum'at.

Tidak lama berselang setelah masjid shirotol Mustaqim selesai dibangun pada tahun 1994, kemudian berdirilah Masjid Imadul Muslimin di

wilayah Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Masjid Imadul Muslimin ini tepatnya terletak di wilayah RW: 42. Tidak seperti masjid lain yang ada di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, masjid ini terkesan tersembunyi. Selain berada di tengah kampung yang padat penduduk, masjid ini juga terletak di tanah yang lebih rendah dari tanah di sekelilingnya. Karena itulah barangkali masjid ini menjadi satu-satunya masjid di Ngemplak Karangjati yang bangunannya terdiri dari dua lantai. Jika masjid ini hanya terdiri dari satu lantai saja, maka tinggi tanah di sekelilingnya akan sejajar dengan atap masjid.

Dalam proses pembangunan keempat masjid diatas sangat terasa sekali nuansa kebersamaan dan gotong-royong dari seluruh umat muslim yang ada di penjuru Pedukuhan. Diungkapkan oleh SJ, bahwa dulu ketika membangun Masjid Imadul Muslimin, warga muslim lain yang bertempat tinggal jauh dari lokasi tersebut juga sering *nglurug* (berjalan kaki dari jauh) untuk membantu.⁵

2. Keadaan Masyarakat

Pada sekitar tahun 60-an, di Pedukuhan Ngemplak Karangjati hanya terdapat satu masjid saja, yaitu Masjid Mujahadah. Baru pada akhir tahun 90-an di pedukuhan ini mulai berdiri empat masjid lainnya. Empat masjid lain tersebut berdiri secara bertahap mulai dari Masjid Miftahul Huda, Masjid Sabilul Muttaqin, kemudian Masjid Shirothol Mustaqim, dan yang terakhir yaitu Masjid Imadul Muslimin. Keadaan masyarakat pada saat hanya terdapat satu masjid saja, sangat berbeda dengan saat sudah berdiri banyak

⁵ Wawancara dengan SJ, Sesepuh Pedukuhan Ngemplak Karangjati dan Pengurus salah satu Pengajian Bapak-bapak di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, di Rumah SJ tanggal 3 Juni 2009.

masjid. Gambaran masyarakat pada saat di Pedukuhan Ngemplak Karangjati hanya terdapat satu masjid saja dapat dilihat dalam uraian berikut.

a. Masyarakat Ketika Belum Banyak Masjid

Masyarakat pada saat di Pedukuhan Ngemplak Karangjati hanya terdapat satu masjid saja, lebih bersifat *paguyuban*. Persatuan masyarakat di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, pada saat itu masih sangat kuat. Masing-masing warga yang tinggal di satu wilayah, masih saling mengenal dengan warga yang tinggal di wilayah lain, meskipun letaknya berjauhan.

Pada saat itu, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan tidak banyak dibatasi oleh lingkup wilayah seperti RT dan RW. Kegiatan-kegiatan seperti SISKAMLING misalnya, pada waktu itu masih dilaksanakan pada lingkup pedukuhan. Organisasi kepemudaan pada waktu itu juga masih pada lingkup pedukuhan. Maka tidak mengherankan jika kemudian masing-masing warga mengenal warga lain yang bertempat tinggal jauh dari tempatnya tinggal. Hal tersebut dimungkinkan karena kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di Pedukuhan Ngemplak Karangjati pada saat itu masih dapat tersentral.

Masyarakat *paguyuban* atau yang oleh Ferdinand Toennies sering disebut dengan “*Gemeinschaft*”, memiliki penyokong-penyokong tertentu. Ketiga *soko guru* yang menyokong *Gemeinschaft* yaitu; darah, tempat tinggal atau tanah, dan jiwa atau rasa kekerabatan, ketetanggaan, dan

persahabatan. Ketiga unsur ini diliputi oleh keluarga. Unsur yang pertama lebih bersifat konstitutif⁶.

Ikatan masyarakat pada saat itu tidak dijiwai oleh adanya suatu kepentingan ataupun nilai ekonomis, namun lebih dijiwai oleh sikap *afektif* dan kepedulian kepada sesama. Hal ini dapat dilihat pada saat seorang warga mendapat musibah, misalnya saat ada warga yang sakit atau meninggal dunia, maka secara otomatis warga akan menunjukkan kepeduliannya dengan menjenguk atau melayat. Keperluan lain, seperti pekerjaan tidak segan-segan ditinggalkan untuk sekedar melayat.

Seperti halnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan pada masa lalu yang dapat tersentral, kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat pada waktu itu juga cenderung lebih tersentral. Salah satu faktornya yaitu, masjid sebagai pusat pembinaan keagamaan masyarakat pada saat itu hanya terdapat satu buah saja. Dengan hanya ada satu buah masjid saja pada saat itu, semakin memperkuat rasa memiliki dari masyarakat Ngemplak Karangjati pada masjid yang ada.

Masjid Mujahadah merupakan satu-satunya masjid yang ada pada saat itu. Mengenai kapan berdirinya Masjid Mujahadah ini, penulis tidak dapat mengetahui secara pasti. Namun yang pasti, Masjid Mujahadah tersebut sudah ada pada pertengahan tahun 60-an, seperti yang diungkapkan oleh GP sebagai berikut :

Ket bapak pertama ning Karangjati, Mesjid Mujahadah ki wis ono. Yho sekitar tahun 64-65-an. Jaman semono mesjide durung mesti dinggo jamaah sedino ping limo. Le adzan yo ming nek pas ono sing adzan wae.

⁶ Sebagaimana dikutip oleh K.J. Veeger dalam *Realitas Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.

Tur nek dino Jemuah wis dinggo Jum'atan. Kae sing ngarep wakafe Pak Kamil, nganggo nadzir NU, terus sing bagian mburi kae wakafe Pak Haji Daldiri, nganggo nadzir kelompok perseorangan.⁷

(Sejak bapak pertama kali datang di Karangjati, Masjid Mujahadah sudah berdiri. Yaitu pada sekitar tahun 1964-1965. Pada saat itu, Masjid Mujahadah belum tentu digunakan untuk sholat berjamaah lima kali pada setiap harinya. Adzan sholat fardhu dikumandangkan hanya jika ada yang adzan. Namun pada hari Jum'at Masjid Mujahadah sudah digunakan untuk ibadah sholat jum'at. Bagian depan dari Masjid Mujahadah merupakan wakaf dari Bapak Kamil, dengan nadzir NU (Nahdatul Ulama). Sedangkan bagian belakang masjid Mujahadah merupakan wakaf dari Bapak Haji Daldiri, dengan nadzir kelompok perseorangan)

Pada sekitar tahun 60-an, dapat dikatakan bahwa pembinaan keagamaan di Pedukuhan Ngemplak Karangjati belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari belum rutinnya penyelenggaraan sholat fardhu lima waktu pada setiap harinya. Pembinaan keagamaan pada saat itu masih terbatas pada pengajian dari rumah-kerumah. Pengajian yang diselenggarakan di Pedukuhan Ngemplak Karangjati pada saat itu tidak hanya terbatas pada satu kelompok pengajian saja.

Kelompok pengajian yang ada pada waktu itu, umumnya terbagi dalam hal wilayah dan pengasuh pengajian. Misalnya saja di wilayah Ngemplak Karangjati bagian selatan diasuh oleh Bapak Gampang Sagimin, sedangkan wilayah Ngemplak Karangjati bagian tengah diasuh oleh Bapak Kamil, demikian diungkapkan oleh SJ⁸. Meskipun begitu, pengajian tersebut tidak membatasi jamaahnya, artinya, warga dari wilayah karangjati yang lain juga bisa ikut berpartisipasi dalam pengajian tersebut.

⁷ Wawancara dengan GP, Tokoh Agama Pedukuhan Ngemplak Karangjati, di Rumah GP tanggal 24 Juni 2009

⁸ Wawancara dengan bapak SJ, Sesepuh Pedukuhan Ngemplak Karangjati, di Rumah SJ tanggal 3 Juni 2009.

Lebih lanjut, SJ mengungkapkan bahwa pada saat itu, pengajian-pengajian tersebut merupakan salah satu sarana silaturahmi yang efektif, bagi warga muslim Ngemplak Karangjati;

Mbiyen ki, gandeng durung okeh masjid, dadi nek ono pengajian ngono do seneng banget. Nek ono pengajian ngono kan trus do iso ketemu sedulur-sedulur sing rodo adoh. Mbiyen nek pas ngaji terus ketemu karo wong-wong tuwone sabilul ngono, sok do matur nuwun karo aku... “wah jo, nuwun banget, tujune koe nganakke pengajian koyo ngene ki, nek raono pengajian ngene ki rak yho do ora ketemu tho”. Masjid Shirothol Mustaqim barang ki, awal mulane yo seko pengajian bapak-bapak. Jamaahe soyo okeh, trus do mikir perlu ngedekke mesjid...akhire yho dadi Mesid Shirothol kuwi.⁹

(Dahulu karena belum banyak terdapat masjid, banyak warga muslim sangat senang jika ada pengajian. Dengan adanya pengajian tersebut kita dapat bertemu dengan warga lain yang tinggal jauh dari tempat kita. Dahulu saat pengajian, ketika bertemu dengan orang-orang dari wilayah lain, terkadang ada yang berterima kasih kepada saya. Mereka berterima kasih kepada saya karena dengan adanya pengajian seperti ini, warga muslim di wilayah Ngemplak karangjati dapat saling bertemu. Masjid Shirothol Mustaqim pada mulanya juga dirintis dari kegiatan pengajian bapak-bapak.)

Dari pernyataan SJ diatas, dapat dilihat bahwa pengajian pada saat itu, selain secara spritual bermanfaat bagi pembinaan keagamaan, juga merupakan sarana silaturrahi yang efektif bagi warga muslim di Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Pengajian dapat dikatakan juga sebagai ajang bertukar pikiran bagi umat muslim Ngemplak Karangjati, mengingat dari sinilah salah satu pijakan dirintis berdirinya masjid-masjid di Ngemplak Karangjati.

⁹ Wawancara dengan bapak SJ, Sesepuh Pedukuhan Ngemplak Karanjati dan Pengurus salah satu Pengajian Bapak-bapak di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, di Rumah SJ tanggal 3 Juni 2009.

Kegiatan di Masjid Mujahadah, yang pada saat itu merupakan satu-satunya masjid yang ada di Ngemplak Karangjati, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan sholat lima waktu saja. Pada peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, dan lain sebagainya, Masjid Mujahadah dijadikan tempat untuk menyelenggarakannya. Tidak seperti pelaksanaan sholat lima waktu, yang lebih didominasi oleh warga di sekitar masjid, peringatan hari besar Islam di Masjid Mujahadah, dapat menjadi kegiatan yang mencakup seluruh umat muslim di Ngemplak Karangjati. Dari kegiatan-kegiatan peringatan hari besar Islam inilah dapat dilihat sentralitas umat muslim di Ngemplak Karangjati.

Dari uraian diatas, dapat kita ambil beberapa point penting, yaitu: masyarakat Ngemplak Karangjati pada waktu sebelum banyak terdapat masjid, lebih bersifat paguyuban jika dibanding dengan keadaan pada waktu sudah berdiri banyak masjid. Sifat kepaguyuban tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu lebih tersentralnya kegiatan masyarakat.

Sentralitas kegiatan masyarakat tersebut kemudian membangun mental kebersamaan dan kesatuan warga. Hanya terdapatnya satu buah masjid di Pedukuhan Ngemplak Karangjati pada waktu itu menjadi salah satu faktor sentralitas tersebut. Pada masa hanya terdapat satu masjid saja di Ngemplak Karangjati, selain sifat kepaguyuban tersebut, masyarakat pada saat itu juga masih banyak mempercayai hal-hal mistik, atau dapat dikatakan islam pada masa itu masih bercorak "*Kejawen*".

Masyarakat di Pedukuhan Ngemplak Karangjati pada masa lalu masih sangat kental dengan nilai-nilai mistik. Kebiasaan untuk membuat sesaji dalam berbagai kegiatan, maupun pelaksanaan tradisi-tradisi Jawa bercorak Hindu masih erat dipegang masyarakat. Masyarakat di Pedukuhan Ngemplak Karangjati pada waktu itu mayoritas menganut Agama Islam. Jika melihat kebiasaan masyarakat pada saat itu, barangkali tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Islam masyarakat pada waktu itu bercorak “*Kejawen*”.

Pada waktu-waktu tertentu, masyarakat terbiasa untuk membuat sesaji atau lebih dikenal masyarakat dengan istilah “*sajen*”. Sesaji-sesaji tersebut kemudian akan diletakkan di tempat-tempat tertentu. Pembuatan sesaji pada waktu-waktu tertentu, salah satunya yaitu, pada saat menyambut bulan suci Ramadhan atau dikenal dengan *Ruwahan*, sedangkan salah satu tempat yang sering digunakan untuk meletakkan sesaji yaitu perempatan yang berada di tengah-tengah wilayah RW 038. Seperti diungkapkan oleh BD berikut:

...yho mbiyen wong ngemplak ki isih do kerep nggawe-nggawe sajen ngono...biasane nek do nggawe sajen trus di deleh ning prapatan kono kuwi... yho misale nek pas sasi rejeb po ruwah ngono bangsane..po nek pas arep poso kae, misale engko mbengi tarwehan, nko sorene njuk do genduren, biasane le genduren ning nggone pak dukuh..mengko le ndongani sajene dudu pak kaume, tapi pak dukuh. Mbiyen dukuhe ijih Pak Warno Utomo..¹⁰

(..yha dulu masyarakat Ngemplak Karangjati masih sering membuat sesaji-sesaji..biasanya sesaji yang dibuat tersebut akan diletakkan di perempatan situ..yha misalnya saja pada saat bulan-bulan tertentu seperti bulan Rajab atau Sya’ban, atau saat

¹⁰ Diungkapkan oleh Bd, Ibu Rumah Tangga, warga RT 09 RW 038

akan memasuki bulan puasa, misalnya saja nanti malam sholat tarawih, maka pada sore harinya masyarakat akan melaksanakan kenduri, yang biasanya dilaksanakan di rumah bapak Dukuh... nanti yang mendoakan sesajinya bukanlah pak kiai, melainkan pak dukuh. Dahulu yang menjabat sebagai dukuh, masih Bapak Warno Utomo..)

Dapat dikatakan bahwa tradisi-tradisi maupun ritual yang dilakukan pada bulan-bulan tertentu seperti Bulan Rajab dan Sya'ban tersebut meskipun bukan tradisi asli Islam, merupakan tradisi yang bagi masyarakat erat dikaitkan dengan agama Islam. Meskipun begitu, peran kiai dalam ritual maupun tradisi tersebut tidak menempati posisi yang penting. Dari pernyataan di atas, dalam ritual maupun tradisi tersebut, peran sesepuh atau orang yang dituakan oleh masyarakat lebih mendominasi. Orang yang dianggap sebagai sesepuh, dalam hal ini yaitu, Bapak Kepala Dusun.

Selain tradisi-tradisi bercorak Islam Kejawaen tersebut, terdapat pula beberapa tradisi lain yang tidak bernuansa Islam, yang sering dilaksanakan oleh masyarakat. Meskipun bukan tradisi yang bernuansa Islam, beberapa hal didalamnya, seperti doa-doa, masih menggunakan cara Islam. Tradisi-tradisi tersebut, diantaranya yaitu tradisi *wiwitan*.

Tradisi *wiwitan* ini merupakan tradisi berupa ritual-ritual tertentu yang dilakukan saat akan memasuki musim menanam padi. Dalam ritual ini beberapa warga yang hendak menanam padi, akan membuat makanan yang nantinya dimaksudkan sebagai sesaji. Setelah sesaji-sesaji tersebut selesai dibuat, kemudian sesaji tersebut akan dikumpulkan di suatu tempat. Setelah warga berkumpul dan sesaji diberi doa-doa oleh sesepuh,

dalam hal ini bapak dukuh, sesaji tersebut kemudian dibawa dan diletakkan di sawah. Mengenai tradisi *wiwitan* ini diungkapkan oleh TR sebagai berikut:

Nek mbiyen sing aku ngalami ki, nek pas dho *wiwitan*...yho le nganakke nek pas dho arep tandhur kae... biasane le nganakke ki nggon komplekke ngone mbah Girah kae... ngko tho do nggawe sajen dewe-dewe, trus dikumpulke dadi siji...yho sing ndongani biasane sing dianggep tuwo, nek mbiyen yho pak dukuh... bar kuwi engko njuk digowo ning sawah, trus panganane sok nggo rayahan cah cilik-cilik, aku mbiyen yho sok melu ngrayah.¹¹

(kalau dulu, tradisi yang saya masih mengalaminya yaitu tradisi *Wiwitan*...tradisi tersebut dilakukan saat akan menjelang musim menanam padi... biasanya yang sering melaksanakan tradisi tersebut, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di komplek Mbah Girah... Nanti masing-masing keluarga akan membuat makanan sendiri-sendiri, kemudian akan dikumpulkan menjadi satu... Yha nanti akan didoakan oleh orang yang dianggap tua, kalau dulu yaitu bapak Dukuh... Setelah itu sesaji tersebut akan dibawa kesawah, yang kemudian sering untuk berebut anak-anak kecil, saya dulu juga sering ikut berebut)

Dari beberapa keterangan diatas, tidak berlebihan jika dikatakan religi masyarakat pedukuhan Ngemplak Karangjati pada saat itu masih bersifat *Animsme-Dinamisme*. Diungkapkan oleh Prof. Dr. Simuh bahwa :

Ciri khas religi animisme-dinamisme adalah menganut kepercayaan ruha dan daya gaib yang bersifat aktif. Prinsip ruh aktif menurut kepercayaan animisme adalah bahwa ruh oeng mati tetap hidup dan bahkan menjadi sakti seperti dewa, bisa mencelakakan atau mensejahterakan masyarakat manusia. Dunia ini juga dihuni oleh berbagai macam ruh gaib yang bisa membantu atau mengganggu kehidupan manusia. Seluruh ritus atau atau meditasi religi animisme dinamisme dimaksudkan untuk berhubungan dan mempengaruhi ruh dan kekuatan gaib tersebut di atas, bahkan melalui meditasi atau dukun prewangon dijalin hubungan langsung untuk minta bantuan dengan ruh dan kekuatan gaib itu.¹²

¹¹ Wawancara dengan TR, Ketua Remaja RW 038, di Rumah TR tanggal 30 Juni 2009.

¹² Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 41.

Berbagai ritual-ritual maupun tradisi yang masih sangat mengakar dalam masyarakat, umumnya memang menggambarkan pemosisian terhadap para leluhur atau ruh-ruh orang yang telah mati sebagai sesuatu yang masih aktif. Aktif disini dapat dimaknai sebagai sesuatu yang masih membawa pengaruh, bahkan menentukan baik atau buruknya kehidupan orang-orang yang masih hidup. Pemosisian terhadap ruh leluhur sebagai sesuatu yang berpengaruh pada kehidupan orang yang masih hidup dapat dilihat dari sesaji-sesaji yang ada dalam berbagai ritual-ritual mistis masyarakat. Sesaji-sesaji tersebut meskipun layak dikonsumsi oleh orang yang masih hidup, umumnya tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi, dan memang khusus dipersembahkan kepada ruh orang-orang yang telah mati. Persembahan tersebut merupakan salah satu wujud penghormatan, dengan maksud terciptanya hubungan yang harmonis antara orang yang masih hidup dan ruh orang-orang yang sudah mati.

b. Masyarakat Ketika Banyak Masjid

Diuraikan sebelumnya bahwa ketika di Pedukuhan Ngemplak Karangjati hanya terdapat satu masjid saja, kegiatan masyarakat dapat tersentral. Sentralitas tersebut ditandai dengan banyaknya kegiatan pada lingkup pedukuhan. Namun untuk saat ini, sudah tidak ada lagi kegiatan kemasyarakatan yang diadakan pada lingkup pedukuhan. Misalpun ada, kegiatan tersebut sangat bersifat insidensial, misalnya saja ketika akan menghadapi pemilu dan lain sebagainya, yang terlibatpun masih sangat

terbatas. Berbeda dengan masa-masa sekarang, kegiatan yang dapat tersentral pada masyarakat sebelumnya, merupakan suatu rutinitas dan sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa.

Berbeda dengan masa lalu, pada masa sekarang ini, kepedulian kepada sesama lebih dijiwai dengan adanya suatu kepentingan maupun nilai-nilai ekonomis. Misalnya saat akan menjenguk orang sakit, masyarakat tidak lagi secara otomatis, namun menunggu ada yang mengkoordinasi. Bahkan terkadang jika orang yang sakit tersebut bukan saudara sendiri, maka akan dikesampingkan. Saat ada warga yang meninggal, terkadang warga berat untuk meninggalkan pekerjaan untuk melayat. Perbedaan dalam hal kepedulian kepada warga lain, antara dahulu dan sekarang ini dapat diilustrasikan seperti diungkapkan oleh TN berikut:

Saiki ki wis bedo banget karo mbiyen. Nek pas ono wong loro ngono, terus do tilik, ndilalah kok ono sing ora tilik, alesane “wah lha raono sing ngandani je”. Nek jaman mbiyen alesan koyo ngono kui, diseneni mesti karo wong-wong tuwo, disauri “lha koe ki rumongso nduwe sedulur wong karangjati ora?”.¹³

(Sekarang itu sudah berbeda sekali dengan jaman dahulu. Jika ada orang yang sedang sakit, lalu ada orang yang tidak pergi menjenguk dengan alasan; “Tidak ada orang yang memberi tahu”, pada jaman dulu pasti akan dicela. Orang yang mengemukakan alasan seperti itu, dianggap tidak memiliki perasaan bahwa sesama warga adalah saudara)

Jika mencermati apa yang diungkapkan oleh TN diatas, maka dapat dikatakan bahwa kepedulian kepada sesama, pada masa lalu merupakan suatu kewajiban. Jika dibandingkan dengan saat sekarang ini,

¹³ Diungkapkan oleh TN, Aktifis kampung, Pengurus RT, Warga RW 40

alasan-alasan tidak menjenguk warga yang sedang sakit karena tidak ada yang memberi tahu, merupakan suatu alasan yang wajar. Artinya, pada masa sekarang ini, menjenguk seorang warga yang sakit, lebih merupakan suatu hak daripada suatu kewajiban.

Kearifan lokal warga pada masa lalu, seperti kebiasaan untuk *srawung*, pada saat ini mulai tersingkirkan oleh berbagai kesibukan seperti pekerjaan, dan lain sebagainya. Terdapat sebuah fenomena menarik, seputar kehidupan bermasyarakat di Pedukuhan Ngemplak Karangajati pada saat ini. Misalnya saja pada saat ada kerja bakti, beberapa warga terkadang lebih memilih untuk mengeluarkan uang atau makanan untuk konsumsi kerja bakti, daripada mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut. Bahkan beberapa orang terkadang lebih memilih bepergian sekedar untuk menyalurkan hobi, seperti memancing, bermain bola dan lain sebagainya.

Fenomena menarik lain juga dapat dilihat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kegiatan perondaan. Di beberapa RT kini telah diterapkan sanksi untuk membayar sejumlah uang bagi warga yang tidak mengikuti kegiatan perondaan. Misalnya saja di RT 09 yang memberikan sanksi bagi warganya yang tidak bisa mengikuti kegiatan perondaan dalam sebulannya, dengan diharuskan membayar Rp 10.000.

Kebijakan RT untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengikuti perondaan dengan diharuskan membayar sejumlah uang tersebut, sebelumnya belum pernah ada. Beberapa hal yang mendorong adanya sanksi tersebut, yaitu; tidak aktifnya beberapa warga dalam kegiatan perondaan sehingga orang yang mengikuti kegiatan perondaan

hanya orang yang sama dalam setiap harinya. Hal tersebut kemudian memunculkan kecemburuan, karena dalam mengikuti kegiatan perondaan tentu saja seorang harus mengorbankan waktu istirahat dan juga biaya, seperti untuk membuat minuman dan sebagainya.

Dengan adanya sanksi tersebut, rupanya tidak membuat orang yang sebelumnya tidak aktif dalam kegiatan perondaan kemudian menjadi aktif. Sebaliknya, sanksi tersebut justru menjadi alasan untuk melegalkan ketidakaktifan mereka. Dari pengamatan sementara penulis, khususnya di wilayah RT 09, memang terdapat beberapa orang warga RT 09, yang statusnya hanya dalam hal domisili saja. Artinya, mereka hanya bertempat tinggal di wilayah RT: 09 saja, namun kurang aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Orang-orang yang kurang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut merupakan warga pendatang.

Bagi warga pendatang yang mempunyai kemampuan menengah keatas secara ekonomi, tentu saja lebih memilih untuk membayar sejumlah uang, yang menurut mereka tidaklah seberapa, daripada harus mengorbankan waktu dan tenaga. Jika dibandingkan dengan keadaan masyarakat pada masa lalu, maka akan sangat berbeda. Kegiatan perondaan pada masa lalu sangat menghargai kehadiran warga, dan hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang. Bagi warga yang tidak datang dalam kegiatan perondaan, tidak segan-segan untuk dihampiri di rumahnya. Bagi warga yang kurang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, sanksi yang didapatkan lebih pada sanksi sosial, seperti digunjing, dikucilkan dan lain sebagainya.

Dapat dilihat terjadi pergeseran disini, yaitu ikatan masyarakat yang sebelumnya dijiwai oleh rasa persaudaraan, kini lebih dijiwai oleh adanya suatu kepentingan dan nilai-nilai ekonomis. Rasa peduli kepada sesama yang disandarkan pada suatu kepentingan, dimaksudkan bahwa ketika bergaul dengan masyarakat sekitar didasarkan pada perhitungan kepentingan yang bermanfaat secara praktis. Sedangkan didasarkannya rasa peduli kepada sesama pada hal-hal yang bernilai ekonomis, diartikan bahwa suatu kegiatan dinilai perlu hanya jika menghasilkan keuntungan, khususnya secara materi.

Masyarakat *Gemeinschaft* tidak akan dapat bertahan secara terus menerus, seandainya tidak ada peraturan, undang-undang, sistem peradilan, dan kepemimpinan. Sekalipun orangnya didorong oleh idealisme dan kemauan baik, dan menggabungkan diri kedalam suatu "Gemeinschaft", mereka tetap membutuhkan kepastian yang menyangkut rejeki dan kebutuhan lain¹⁴.

B. Perbedaan Seputar Perayaan Idul Fitri

Dalam melihat perbedaan yang terjadi di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, perlu dilihat dari dua Aspek. Pertama: dari sisi argumen teologis seputar penentuan tanggal 1 Syawal, dan yang kedua: dilihat dari perbedaan yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu nantinya akan terlihat posisi perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal, kaitannya dengan perbedaan yang berkembang di masyarakat Pedukuhan Ngemplak Karangjati.

¹⁴ K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, hlm. 131.

Adanya kepentingan dari elit masjid terhadap posisi dan kekuasaannya di dalam masyarakat, memungkinkan perbedaan penentuan Syawal tersebut hanyalah sebagai alat untuk menunjukkan pengaruhnya. Perbedaan dalam perayaan Idul Fitri di masyarakat Pedukuhan Ngemplak Karangjati sebelumnya tidak pernah terjadi, meskipun terdapat perbedaan penentuan 1 Syawal. Masyarakat pada saat itu dimungkinkan masih bersifat paternalistik, atau elit agamanya masih dimaknai secara personal. Atau mungkin juga kekuasaan elit-elit agama yang pada saat itu tidak terpecah.

Sebelum berbicara lebih jauh pada permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu sedikit diuraikan mengenai perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal. Uraian ini lebih pada argumen teologis yang melatar belakangi adanya perbedaan dalam penentuan tanggal 1 Syawal. Uraian ini juga lebih bersifat umum, dalam arti belum dikaitannya dengan konflik dan elit-elit masjid. Mengenai argumen teologis perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal tersebut dapat dilihat pada uraian berikut.

1. Argumen Teologis Penentuan Tanggal 1 Syawal

Perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal, khususnya di Indonesia, bukanlah hal yang baru-baru ini saja terjadi. Secara garis besar, perbedaan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat terjadi antara dua kubu organisasi terbesar di Indonesia. Dua organisasi besar tersebut yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Namun selain kedua organisasi terbesar tersebut terdapat pula keputusan tentang hari raya yang diumumkan oleh pemerintah Indonesia.

Perbedaan utama antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, terkait dengan penentuan tanggal 1 Syawal yaitu, terletak pada metode yang

digunakan. Muhammadiyah cenderung pada metode hisab, sedangkan Nahdatul Ulama cenderung pada penggunaan metode rukyat. A. Sahal Mahfudz, Rais Aam Syuriah PB NU, ketika ditanya tentang boleh tidaknya penggunaan metode hisab untuk menentukan awal bulan Syawal, mengatakan: “Yang pasti, dalam menetapkan awal Syawal dan Ramadhan, NU menggunakan prinsip rukyat”¹⁵. Sedangkan Ahmad Syafii Maarif, ketua PP Muhammadiyah, mengatakan:

Muhammadiyah cenderung kepada pendekatan hisab, yang berarti perhitungan secara ilmiah. Sebab, Muhammadiyah meyakini, demikianlah isyarat dari Al-Qur'an dan al-Hadis. Banyak ayat Al-Qur'an menyeru kita untuk berpikir tentang pergantian siang dan malam, pergantian bulan dan matahari, sebagai tanda-tanda bagi orang yang berfikir dan isyarat untuk menghitung perjalanan bulan dan matahari. Begitu pula dalam hadis, Muhammadiyah berpegang kepada matan hadis, yang artinya: “maka hitunglah”. Selain itu, pendekatan ini memiliki kelebihan.¹⁶

Menurut Turaichan Ajhuri Kudus, seorang ahli falak Nahdatul Ulama, hisab artinya perhitungan tanggal-tanggal berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan ahli falak, sehingga bisa tersusun kalender dalam satu tahun, sedangkan rukyat artinya mata, atau (menggunakan teropong) untuk melihat bulan sabit.

Lebih lanjut, Masdar F. Mas'udi, Pengurus besar Nahdatul Ulama, mengatakan:

Sesuai dengan perintah Nabi, kita diharuskan berpuasa jika melihat bulan sebagai awal bulan Ramadhan. Demikian juga untuk mengakhiri puasa, kita harus melihat bulan, yakni awal bulan Syawal. Sebagian orang melihat secara langsung bulan di tempat-tempat tertentu. Tetapi sebagian orang ingin menentukan terbitnya bulan melalui hisab atau perhitungan. Selama ini baik NU,

¹⁵ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat, Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 134.

¹⁶ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat*, hlm. 135.

Muhammadiyah, maupun ormas-ormas Islam lainnya selalu melakukan hisab untuk menentukan awal bulan Ramadhan. Tetapi, tetapi bagi NU, hisab itu masih harus disempurnakan dengan melihat bulan atau rukyatul hilal¹⁷.

Sebenarnya, baik NU maupun Muhammadiyah, dalam menentukan tanggal 1 Syawal menggunakan dasar yang sama. Dasar tersebut yaitu Hadis Nabi, yang artinya:

"Berpuasalah jika kalian telah melihat bulan, dan berbukalah jika kalian melihatnya pula. Dan jika bulan tertutup dari pandangan kalian maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari". (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁸

Namun ada matan dalam hadis tersebut, yang dimaknai secara berbeda oleh NU dan Muhammadiyah. Matan hadis tersebut ialah, yang berbunyi "melihat". Matan hadis tersebut lebih dimaknai oleh NU, melihat dengan mata kepala, sedangkan menurut Muhammadiyah, kata "melihat" tersebut bisa dimaknai dengan melihat menggunakan mata pikiran.

Ahmad Syafii Maarif, Ketua PP Muhammadiyah, mengungkapkan bahwa dalam pandangan Muhammadiyah, rukyat itu dipandang bukan semata-mata sebagai melihat dengan mata kepala. Rukyat dalam bahasa Arab itu artinya melihat. *Roa, yaro, ru'yat*. Tapi Muhammadiyah memahaminya tidak semata melihat dengan mata kepala, secara fisik dengan mata kepala. Tapi, melihat dengan mata pikiran. Juga, melihat dengan ilmu pengetahuan, *bil 'ilmi*¹⁹.

¹⁷ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat*, hlm. 140-141.

¹⁸ Salim Bin Id Al-Hilali dan Ali Hasan Ali Abdul Hamid, *Puasa Bersama Nabi* terj. Azhar Khalid Seff dan Muhammad Iqbal (Jakarta: Darus Sunnah Press), hlm. 38.

¹⁹ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat*, hlm. 136.

Meskipun NU menitik beratkan pada metode rukyat, NU menggunakan pula metode hisab. Hanya saja, keputusan akhir lebih dititik beratkan pada hasil rukyat, yaitu hasil melihat dengan mata kepala. Artinya, metode hisab lebih menjadi sumber sekunder, sedangkan rukyat dijadikan sumber primernya.

Untuk keputusan yang diambil pemerintah, terkait penentuan tanggal 1 Syawal, didasarkan pada Sidang Itsbat. Sidang Itsbat, yaitu sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah yang dihadiri berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia²⁰. Posisi pemerintah disini dapat dimaknai sebagai penengah ataupun hakim. Meskipun begitu, keputusan pemerintah tersebut tidak mengikat umat Islam secara hukum, sehingga umat Islam di Indonesia tidak wajib untuk mengikuti keputusan pemerintah tersebut.

Baik Nahdatul Ulama, maupun Muhammadiyah tentu saja termasuk dalam peserta sidang tersebut. Meskipun begitu, keputusan pemerintah tentu tidak dapat mengayomi seluruh organisasi yang turut serta dalam sidang tersebut. Hal tersebut dikarenakan keputusan pemerintah pasti jatuh pada salah satu dari dua hari yang dimungkinkan merupakan tanggal 1 Syawal. Keputusan pemerintah melalui sidang itsbat itu, tentu saja tidak serta merta diikuti oleh berbagai organisasi yang ikut dalam sidang tersebut. Dapat dilihat jika keputusan pemerintah tidak sesuai dengan hasil hisab Muhammadiyah, maka Muhammadiyah tidak kemudian mengikuti keputusan pemerintah.

²⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 106.

Demikian pula sebaliknya, ketika keputusan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan hasil rukyat yang dilakukan Nahdatul Ulama.

Perdebatan tentang hisab rukyat sampai kini masih belum menemukan titik temu. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah (Ramadhan, Syawal, Zulhijjah). Perbedaan penentuan 1 Syawal, dari Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan pemerintah, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1994 dapat dilihat dalam tabel berikut ini²¹:

Tabel 1.4
Perbedaan Penetapan Idul Fitri

No	Thn	muhammadiyah	NU	Pemerintah
1	1985	Kamis/20 Juni 1985	Rabu/19 Juni 1985	Kamis/20 Juni 1985
2	1992	Ahad/ 5 April 1992	Sabtu/4 April 1992	Ahad/5 April 1992
3	1993	Kamis/ 25 Maret 1993	Rabu/24 Maret 1993	Kamis/25 Maret 1993
4	1994	Senin/ 14 Maret 1994	Ahad/13 Maret 1994	Senin/14 Maret 1994

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1994, terjadi empat kali perbedaan dalam menentukan awal bulan Syawal. Perbedaan tersebut terjadi pada tahun 1985, 1992, 1993, dan

²¹ Susiknan Azhari, *Enslikopedi Hisab Rukyat*, hlm. 119.

tahun 1994. Pada tahun-tahun ini, penetapan awal bulan Syawal dari Muhammadiyah cenderung sama dengan ketetapan dari pemerintah. Berbeda dengan beberapa tahun belakangan ini, bahwa keputusan Muhammadiyah sering berbeda dengan pemerintah.

2. Masjid dan Perayaan Idul Fitri

Perbedaan yang dimaksud disini yaitu perbedaan antara masjid-masjid yang ada di Ngemplak Karangjati terkait dengan kebijakannya seputar hari raya. Masjid yang dimaksudkan disini lebih terfokus pada tiga masjid dari lima masjid yang keseluruhan ada di Ngemplak Karangjati. Ketiga masjid tersebut yaitu Masjid Mujahadah, Masjid Sabilul Muttaqin dan Masjid Shirathal Mustaqim.

Secara umum, perbedaan seputar hari raya yang ada di pedukuhan Ngemplak Karangjati terkait pada dua hal, yang pertama yaitu mengenai perbedaan dalam menentukan tanggal 1 Syawal, dan yang kedua yaitu perbedaan dalam hal tempat penyelenggaraan Sholat Ied.

Telah disebutkan sebelumnya pada pengantar sub bab ini bahwa perbedaan dalam perayaan Idul Fitri sebelumnya tidak pernah terjadi di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, meskipun saat itu sudah ada perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal. Salah satu sebabnya yaitu adanya sentralitas dari elit masjid. Sentralitas tersebut dapat dimaknai dengan terkonsolidasinya elit dalam suatu wadah. Dengan begitu, konsensus antara masing-masing elit dapat selalu tercapai karena kekuasaan yang ada masih dalam satu bingkai.

Organisasi yang berfungsi sebagai wadah tersebut yaitu PAMUKTI (Paguyuban Masjid dan Mushalla Ngemplak Karangjati).

PAMUKTI sendiri berdiri pada sekitar tahun 1996. Pada saat itu di Pedukuhan Ngemplak Karangjati sudah terdapat lima masjid. Pada awal berdirinya, organisasi ini dapat berfungsi dengan baik sebagai pengkoordinir masjid-masjid yang ada di Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Namun beberapa tahun sebelum Masjid Sabilul Muttaqin menyelenggarakan Sholat Ied Untuk pertamakalinya, fungsi PAMUKTI tersebut memang mulai melemah.

Kaitannya dengan adanya perbedaan dalam penentuan 1 syawal ini, PAMUKTI sangat berperan besar dalam menyatukan suaranya masjid-masjid yang ada di Ngemplak Karangjati. Biasanya, beberapa hari menjelang hari raya PAMUKTI akan mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan penentuan tanggal 1 Syawal.

Kebijakan yang diambil dari hasil musyawarah PAMUKTI terkait dengan penentuan tanggal 1 Syawal, selalu mengikuti apa yang diumumkan oleh pemerintah. Jadi keputusan tersebut bukanlah didasarkan pada hari yang lebih awal atau yang lebih akhir, dan bukan berdasar dari pendapat dari Nahdatul Ulama ataupun dari Muhammadiyah.

Ada beberapa hal yang dijadikan dasar oleh PAMUKTI untuk mengikuti keputusan pemerintah, ketika terjadi perbedaan dalam penentuan 1 Syawal. Beberapa alasan untuk mengikuti keputusan dari pemerintah yaitu, pertama: pemerintah dalam menentukan tanggal 1 Syawal dilakukan melalui sebuah sidang yang bernama sidang Itsbat. Dalam sidang tersebut

dikumpulkan seluruh ormas-ormas Islam yang ada di seluruh Indonesia, yang tentu saja termasuk didalamnya NU dan Muhammadiyah. Dua organisasi Islam inilah yang merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang sering berbeda satu sama lain dalam menentukan tanggal 1 syawal. Alasan yang kedua yaitu; merujuk pada sebuah kaidah fiqih, bahwa ketika terjadi suatu perbedaan, maka keputusan hakim menjadi penyatu atau penengah dari perbedaan tersebut. Dari sinilah kemudian posisi pemerintah dimaksudkan dalam posisi sebagai hakim.

Pernah pada suatu waktu, dua masjid yang ada di wilayah Ngemplak Karangjati menyelenggarakan Sholat Ied pada hari yang sama. Dua masjid tersebut yaitu Masjid Mujahadah dan Masjid Sabilul Muttaqin. Pada saat itu memang terjadi perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal oleh NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah berhari raya sehari lebih awal dari yang diputuskan oleh NU. Masjid Mujahadah dan Sabilul Muttaqin pada saat kebetulan melaksanakan Sholat Ied pada hari yang lebih awal, yang dalam hal ini lebih dilatarbelakangi oleh keputusan dari Muhammadiyah.

Hal ini tentu saja memunculkan beberapa kontroversi dari para tokoh agama di Ngemplak Karangjati. Sebagian tokoh menilai langkah Masjid Mujahadah dan Sabilul Muttaqin tersebut tidak lagi menghargai keputusan yang selama ini telah menjadi kesepakatan bersama. Selain itu, kebijakan yang diambil oleh kedua masjid tersebut dianggap pula telah mengesampingkan nilai-nilai persatuan yang ditanamkan dalam fungsi PAMUKTI. Suasana malam menjelang hari raya pada saat itu terasa tidak menyenangkan. Kegiatan *Takbiran* (takbir keliling) yang biasanya dilaksanakan bersama-sama oleh lima

masjid, malam itu dilakukan sendiri-sendiri dan beberapa masjid masih ada yang melaksanakan Sholat Tarawih.

Salah satu masjid yang masih mengikuti "tradisi" PAMUKTI dahulu, yaitu Masjid Shirothol Mustaqim. Pada malam hari saat beberapa masjid di Pedukuhan Ngemplak Karangjati sudah mengumandangkan takbir hari raya, jamaah Masjid Shirothol Mustaqim selepas Sholat Isya berjamaah, menunggu pengumuman dari pemerintah melalui media. Setelah diketahui bahwa pemerintah memutuskan bahwa hari raya masih satu hari lagi, maka kemudian jamaah Masjid Shirothol Mustaqim kemudian melanjutkan berjamaah Shalat Tarawih.

Keadaan seperti ini sudah sebanyak dua kali dialami di Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Pada kali pertama, Masjid Shirothol Mustaqim pada akhirnya digunakan untuk menyelenggarakan Sholat Ied. Pada saat itu masjid Shirothol Mustaqim belum digunakan untuk Sholat Jum'at, meskipun memang masjid tersebut sudah mengalami perluasan. Keputusan Masjid Shirothol Mustaqim untuk digunakan dalam penyelenggaraan Sholat Ied pada saat itu yaitu, untuk memfasilitasi jamaah yang berhari raya pada hari yang lebih akhir. Itulah untuk pertama dan terakhir kalinya Masjid Shirothol Mustaqim digunakan untuk Sholat Ied. Sedangkan pada kali kedua di Ngemplak Karangjati terjadi perbedaan, Masjid Sabilul Muttaqin digunakan sebanyak dua kali untuk menyelenggarakan sholat Ied, yaitu di hari yang pertama dan di hari yang kedua.

Selain perbedaan dalam hal penentuan tanggal 1 Syawal, perbedaan kedua yang terjadi di Ngemplak Karangjati seputar hari raya, yaitu perbedaan

dalam hal tempat penyelenggaraan Sholat Ied. Saat ini ada dua tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan Sholat Ied, yaitu masjid dan lapangan. Masjid di Ngemplak Karangjati yang saat ini sering dijadikan tempat untuk menyelenggarakan Sholat Ied yaitu masjid mujahadah dan masjid Sabilul Muttaqin.

Pada awalnya, satu-satunya masjid di Ngemplak karangjati yang digunakan untuk Sholat Ied yaitu Masjid Mujahadah. Baru kemudian pada tahun 2004, untuk pertama kalinya Masjid Sabilul Muttaqin digunakan untuk penyelenggaraan Sholat Ied. Digunakannya Masjid Sabilul Muttaqin untuk menyelenggarakan Sholat Ied ini, bagi beberapa tokoh dipandang sebagai salah satu tanda bahwa persatuan umat muslim di Ngemplak Karangjati mulai luntur.

Salah satu tokoh yang memandang adanya dua tempat penyelenggaraan Sholat Ied di Ngemplak karangjati merupakan hal yang mengurangi keguyuban masyarakat, yaitu GP. Dapat dikatakan bahwa GP merupakan salah satu tokoh agama sentral yang ada di Ngemplak Karangjati. Ketika masjid Sabilul Muttaqin untuk pertama kalinya digunakan untuk Sholat Ied. Bapak SR selaku pengurus takmir Masjid Sabilul Muttaqin, meminta GP untuk menjadi khatib. Salah satu pertimbangan untuk memilih GP sebagai khatib adalah supaya tidak ada gejolak dari jamaah. Pertimbangan tersebut didasarkan bahwa selama ini GP dianggap sebagai seorang tokoh sentral. GP sendiri tidak menyanggapi hal tersebut, selain karena telah diminta menjadi khatib di tempat lain juga menganggap digunakannya masjid sabilul muttaqin untuk sholat Ied, jelas tidak sesuai dengan ketentuan agama

dan nilai-nilai persatuan yang sebelumnya dibangun bersama di dalam PAMUKTI²².

Keprihatinan dari GP tersebut kemudian memunculkan suatu gagasan untuk mencari tempat yang sekiranya cukup untuk menampung umat muslim Ngemplak Karangjati dalam melaksanakan sholat hari raya dalam satu tempat. Melalui Masjid Shirothol Mustaqim, dimana GP menjadi penasihat dalam ketakmiran, gagasan untuk menyediakan tempat tersebut dicoba untuk direalisasikan. Memanfaatkan lahan persawahan yang ada di tepi sebelah Selatan wilayah Ngemplak karangjati yang sudah tidak ditanami, pada akhirnya disiapkanlah sebuah lapangan yang belakangan dinamai “Lapangan Jati Manunggal”. Nama dari lapangan ini melambangkan suatu harapan bahwa nantinya umat muslim Ngemplak Karangjati bisa bersatu seperti pada masa lalu.

Meskipun lapangan ini telah disiapkan dan sudah beberapa kali digunakan untuk sholat Ied, masih belum bisa untuk menyatukan umat muslim Ngemplak Karangjati untuk paling tidak bersama-sama dalam melaksanakan sholat Ied. Kedua masjid, baik Masjid Mujahadah maupun masjid Sabilul Muttaqin masih menghendaki untuk melaksanakan sholat Ied di Masjid masing-masing.

²² Wawancara dengan GP, Pemuka Agama dan Penasehat di Masjid Shirothol Mustaqim, di rumah GP tanggal 24 Juni 2009.

BAB IV
ELIT DAN KONFLIK
SEPUTAR PERAYAAN IDUL FITRI

A. Afiliasi Masjid

Permasalahan perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal secara umum melibatkan dua organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Perbedaan tersebut, seperti telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, lebih dilatar belakangi oleh persoalan teologis seperti tafsir dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini, pengertian masjid lebih dimaknai secara sosiologis. Namun meskipun begitu, pemetaan masjid dari segi afiliasinya, misalnya saja apakah merupakan masjid NU atau Muhammadiyah tetap diperlukan.

Pemetaan afiliasi masjid ini diperlukan ketika membicarakan elit dan kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan tertentu terkait permasalahan perbedaan penentuan 1 Syawal. Karena ketika ada suatu kepentingan dari elit masjid, afiliasi ini terkadang lebih muncul belakangan. Sewajarnya ketika suatu masjid, misal berafiliasi sebagai masjid NU, maka ketika terjadi perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal akan mengikuti keputusan dari NU, demikian juga sebaliknya ketika masjid tersebut berafiliasi sebagai masjid Muhammadiyah. Sedangkan jika masjid tidak memiliki afiliasi tertentu, namun ketika terjadi perbedaan penentuan 1 Syawal mengikuti pada pendapat ormas tertentu, maka ini bisa saja mengindikasikan adanya suatu kepentingan.

Pembahasan mengenai peta afiliasi masjid ini difokuskan pada tiga masjid dari keseluruhan lima masjid yang ada di Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Fokus pada ketiga masjid dengan pertimbangan bahwa permasalahan perbedaan dalam perayaan Idul Fitri ini memang lebih melibatkan tiga masjid. Ketiga masjid tersebut yaitu Masjid Mujahadah, Masjid Sabilul Muttaqin dan Masjid Shirothol Mustaqim.

1. Masjid Mujahadah

Masjid Mujahadah merupakan masjid yang pertama kali berdiri di Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Masjid ini sudah ada sejak tahun 1960, sedangkan keempat masjid lain di Pedukuhan Ngemplak Karangjati baru berdiri pada akhir tahun 1980-an.

Sebagai satu-satunya masjid pada saat itu sampai sebelum masjid Sabilul Muttaqin dan Shirothol Mustaqim menyelenggarakan Sholat Ied, Masjid Mujahadah sudah biasa digunakan untuk menyelenggarakan Sholat Ied setiap taunnya. Pada saat itulah sebagai satu-satunya tempat penyelenggaraan Sholat Ied di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, secara umum masyarakat tidak pernah berbeda dalam merayakan Idul Fitri.

Masjid Mujahadah pada mulanya dapat dikatakan berafiliasi sebagai masjid NU. Diungkapkan oleh GP sebagai berikut :

Ket bapak pertama ning Karangjati, Mesjid Mujahadah ki wis ono. Yho sekitar tahun 64-65-an. Jaman semono mesjide durung mesti dinggo jamaah sedino ping limo. Le adzan yo ming nek pas ono sing adzan wae. Tur nek dino Jemuah wis dinggo Jum'atan. Kae sing ngarep wakafe Pak Kamil, nganggo nadzir NU, terus sing bagian mburi kae wakafe Pak Haji Daldiri, nganggo nadzir kelompok perseorangan.¹

¹ Wawancara dengan GP, Tokoh Agama Pedukuhan Ngemplak Karangjati, di Rumah GP tanggal 24 Juni 2009

(Sejak bapak pertama kali datang di Karangjati, Masjid Mujahadah sudah berdiri. Yaitu pada sekitar tahun 1964-1965. Pada saat itu, Masjid Mujahadah belum tentu digunakan untuk sholat berjamaah lima kali pada setiap harinya. Adzan sholat fardhu dikumandangkan hanya jika ada yang adzan. Namun pada hari Jum'at Masjid Mujahadah sudah digunakan untuk ibadah sholat jum'at. Bagian depan dari Masjid Mujahadah merupakan wakaf dari KM, dengan nadzir NU (Nahdatul Ulama). Sedangkan bagian belakang masjid Mujahadah merupakan wakaf dari DL, dengan nadzir kelompok perseorangan)

Disebutkan pada mulanya berafiliasi sebagai masjid NU karena sebelumnya memang Masjid Mujahadah ini adalah milik perorangan, yaitu sebelum bagian belakang Masjid Mujahadah dibangun. Saat itu tanah yang digunakan untuk membangun Masjid Mujahadah merupakan tanah dari KM. Sebagai pewakaf tunggal Masjid Mujahadah pada saat itu, KM memang sangat dikenal sebagai orang NU. Namun setelah Masjid Mujahadah mengalami perluasan dengan dibangunnya bagian belakang masjid dengan tanah wakaf dari DL, maka kepemilikan tunggal Masjid Mujahadah oleh KM mulai "terkaburkan" pula. Dengan begitu afiliasi Masjid Mujahadah sebagai masjid NU juga sedikit demi sedikit menjadi terkikis.

Perlu diketahui bahwa pada sekitar tahun 1995, masyarakat Ngemplak Karangjati pernah melakukan Sholat Ied di satu tempat. Sholat Ied tersebut adalah sholat pada hari Raya Idul Adha. Tempat tersebut berupa lapangan, sehingga dimungkinkan cukup untuk menampung umat muslim Ngemplak Karangjati. Pada saat itu memang telah ada Masjid Mujahadah yang biasa digunakan untuk Sholat hari raya. Penyelenggaraan Sholat Ied di Lapangan dimaksudkan agar jamaah yang tertampung bisa lebih banyak.

Kepanitiaan penyelenggara Sholat Ied tersebut bukan atas nama salah satu masjid, namun Panitia Hari Idul Adha Karangjati Sinduadi Mlati Sleman.

Pada saat itu Masjid Mujahdah yang berafiliasi sebagai masjid NU tidak begitu menyetujui penyelenggaraan Sholat Ied di Lapangan. Karena itulah ketika diselenggarakan Sholat Ied di Lapangan pada tahun 1995 tersebut, beberapa warga yang berafiliasi sebagai warga NU tetap menyelenggarakan Sholat Ied sendiri di Masjid Mujahdah². Saat itu Masjid Mujahdah belum mengalami perluasan, sehingga masih lekat dengan imej sebagai masjid NU. Penyelenggaraan Sholat Ied di Lapangan tersebut, hanya berlangsung satu kali saja. Karena kemudian, di lapangan tersebut dibangun sebuah POM Bensin.

Saat ini Masjid Mujahdah dari segi bangunannya tidak memiliki afiliasi tertentu sebagai masjid NU ataupun masjid Muhammadiyah. Namun secara struktur di dalamnya afiliasi-afiliasi ini bisa ditemukan. Afiliasi tersebut lebih diwakili oleh elit-elit masjid di dalamnya. Ketika melihat permasalahan penentuan tanggal 1 Syawal afiliasi dari masing-masing elit tersebut semakin terlihat.

Ketika Masjid Mujahdah untuk pertamakalinya menyelenggarakan Sholat Ied mengikuti pendapat dari Muhammadiyah, saat itu kebetulan yang menjadi ketua takmir yaitu PN. Diungkapkan oleh AY bahwa PN yang saat itu menjabat sebagai ketua takmir Masjid Mujahdah disebut sebagai orang yang dekat dengan salah seorang ketua Majelis Pimpinan Daerah

² Wawancara dengan SJ, Sesepeh Pedukuhan Ngemplak Karangjati, di Rumah SJ tanggal 3 Juni 2009.

Muhammadiyah³. Seorang pengurus Masjid Mujahadah lainnya yang disebut oleh AY sebagai orang yang kuat mengikuti pendapat Muhammadiyah dalam menentukan hari raya yaitu AG.

Saat perayaan Idul Fitri 1430 H, ketua takmir Masjid Mujahadah dipegang oleh HY. Ketika menyikapi perbedaan dalam penentuan tanggal 1 Syawal, HY lebih bersikap netral yaitu dengan mengikuti keputusan pemerintah. Komitmen dari takmir untuk mengikuti keputusan pemerintah pada Idul Fitri 1430 H tersebut memang tidak seperti sebelumnya yang selalu mengikuti keputusan dari Muhammadiyah⁴. Namun kebetulan pada Idul Fitri tahun 1430 H tidak terjadi perbedaan antara NU, Muhammadiyah dan Pemerintah.

2. Masjid Sabilul Muttaqin

Masjid Sabilul Muttaqin ini berada di wilayah Ngemplak Karangjati tepatnya di RT: 03, RW: 36. Salah satu hal yang menarik dari pembangunan Masjid Sabilul Muttaqin ini yaitu, bahwa masjid ini dibangun sebanyak dua kali. Pembangunan Masjid Sabilul Muttaqin untuk kedua kalinya tersebut tersebut dilakukan karena adanya bantuan dari organisasi BSM (Bulan Sabit Merah). Dengan adanya bantuan dari Bulan Sabit Merah tersebut, dan kebetulan memang sudah dianggap perlu untuk memperluas masjid, mengingat jika Sholat Jum'at, masjid sudah tidak cukup untuk menampung jamaah sehingga jika hujan akan merepotkan jamaah.

³ Wawancara dengan AY, Pengurus Masjid Mujahadah, di Masjid Mujahadah tanggal 1 Juni 2009.

⁴ Diungkapkan oleh DD, Pengurus Remaja Masjid Mujahadah.

Pembangunan kedua Masjid Sabilul Muttaqin dengan sponsor dari BSM ini menggunakan nadzir dari Pemerintah⁵. Namun ketika terjadi perbedaan dalam penentuan tanggal 1 Syawal, sejak Masjid Sabilul Muttaqin digunakan pertamakalinya untuk menyelenggarakan Sholat Ied sampai dengan saat ini, lebih cenderung pada keputusan Muhammadiyah. Penggunaan Masjid Sabilul Muttaqin untuk menyelenggarakan Sholat Ied ini dilakukan setelah pembangunan dengan sponsor dari BSM tersebut selesai.

Salah satu pengurus Masjid Sabilul Muttaqin yang cenderung mengikuti keputusan Muhammadiyah ketika terjadi perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal yaitu NS. NS merupakan orang yang sangat terlibat dalam pembangunan kedua Masjid Sabilul Muttaqin, yaitu sebagai pemborong pembangunannya. Saat ini NS merupakan ketua takmir dari Masjid Sabilul Muttaqin.

Semenjak Masjid Sabilul Muttaqin digunakan untuk menyelenggarakan Sholat Ied, pengurus masjid selalu mengikuti keputusan dari Muhammadiyah. Meskipun begitu, Masjid Sabilul Muttaqin tidak berafiliasi sebagai masjid Muhammadiyah. Hal ini dapat dilihat ketika Masjid Sabilul Muttaqin digunakan sebanyak dua kali untuk menyelenggarakan Sholat Ied. Pada hari yang pertama merupakan keputusan yang diambil Muhammadiyah dan hari yang kedua merupakan keputusan dari Pemerintah dan NU. Secara resmi, pengurus memang mengumumkan bahwa masjid mengikuti keputusan Muhammadiyah. Sedangkan digunakannya Masjid Sabilul Muttaqin untuk Sholat Ied untuk hari yang kedua dilakukan untuk

⁵ Wawancara dengan KR, Pengurus Masjid Sabilul Muttaqin, di Masjid Sabilul Muttaqin tanggal 22 Mei 2009.

memfasilitasi umat muslim Ngemplak Karangjati. Pada saat itu memang tidak ada tempat penyelenggaraan Sholat Ied di Pedukuhan Ngemplak Karangjati pada hari yang kedua.

Secara sederhana terkait permasalahan perbedaan penentuan 1 Syawal, afiliasi dari dari pengurus masjid lebih pada Muhammadiyah. Sedangkan dari segi institusi keagamaan, Masjid Sabilul bukanlah masjid Muhammadiyah. Dalam pembangunannya, Masjid Sabilul Muttaqin menggunakan nadzir dari Pemerintah. Sedangkan Afiliasi pengurus masjid pada keputusan Muhammadiyah tidaklah terlalu kaku. Indikasinya yaitu pengurus masjid pernah memfasilitasi umat muslim yang berhari raya mengikuti keputusan Pemerintah dan NU, dengan menyelenggarakan Sholat Ied sebanyak dua kali di Masjid Sabilul Muttaqin.

3. Masjid Shirothol Mustaqim

Jika dilihat dari sejarah berdirinya, Masjid Shirothol Mustaqim ini tidak memiliki afiliasi tertentu. Para pewakaf masjid tidak memiliki kecenderungan pada afiliasi tertentu. Selain itu, banyaknya pewakaf akan mengaburkan afiliasi yang ada secara personal. Dalam kegiatan peribadahan sehari-hari, Masjid Shirothol Mustaqim tidak memiliki kecenderungan pada afiliasi tertentu.

Untuk permasalahan perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal, Masjid Shirothol Mustaqim tidak berafiliasi pada NU ataupun Muhammadiyah. Masjid Shirothol Mustaqim selalu mengikuti keputusan dari pemerintah. Salah satu pengurus Masjid Shirothol Mustaqim yang kuat menekankan bahwa Masjid Shirothol Mustaqim akan selalu mengikuti pada keputusan

Pemerintah adalah GP. Sedangkan dalam kepengurusan Masjid Shirothol Mustaqim, GP menempati posisi sebagai Penasehat.

Penekanan GP untuk mengikuti keputusan dari pemerintah tersebut terkait erat dengan keputusan PAMUKTI. Alasan yang sering dikemukakan oleh GP yaitu bahwa Pemerintah merupakan hakim ketika terjadi perbedaan. Selain itu keputusan pemerintah tersebut diambil melalui sidang Itsbat, yang didalamnya terdapat wakil dari NU maupun Muhammadiyah.

Selama ini keputusan Masjid Shirothol Mustaqim untuk selalu mengikuti keputusan pemerintah juga merupakan wujud tidak setujunya masjid untuk memiliki "label-label" tertentu. Yang dimaksud dengan label disini yaitu label sebagai masjid NU ataupun Muhammadiyah. Adanya label tersebut dikhawatirkan akan memecah jamaah.

B. Konflik Seputar Perayaan Idul Fitri

Berbicara mengenai konflik ini, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan PAMUKTI. Sebagai institusi yang mengkoordinir masjid-masjid di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, sebelumnya PAMUKTI selalu berhasil menyatukan suara masjid-masjid yang ada di Ngemplak Karangjati dalam mengambil keputusan mengenai penetapan 1 Syawal. Kebijakan PAMUKTI terkait perbedaan penentuan 1 Syawal yaitu, selalu mengikuti pemerintah. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, pemerintah dianggap berposisi sebagai hakim. Kedua, pemerintah memutuskan 1 Syawal melalui sidang Itsbat yang didalamnya terdapat ormas-ormas Islam termasuk Muhammadiyah dan NU. Ketiga, masjid-masjid di Ngemplak Karangjati diharapkan tidak "membangun label" dengan

mengikuti ormas tertentu. Hal ini karena dikhawatirkan akan menciptakan perpecahan dalam masyarakat.

Ketika PAMUKTI sebagai institusi pengkoordinir masjid mulai kehilangan fungsinya, kemudian lahir perbedaan-perbedaan berkenaan dengan perayaan hari raya di Pedukuhan Ngemplak Karangjati. Hal inilah yang kemudian memunculkan konflik. Elit masjid yang masih berpegang pada keputusan PAMUKTI, mempertahankan masjidnya untuk mengikuti keputusan pemerintah. Pihak ini kemudian dihadapkan pada elit-elit masjid lain yang mengarahkan masjidnya untuk mengikuti Muhammadiyah.

Konflik bagi *Coser* merupakan perjuangan atas nilai-nilai dan menuntut status yang langka, kekuasaan, dan sumber yang menetralkan tujuan-tujuan lawan untuk melukai atau mengeliminasi lawan-lawan mereka⁶.

Dalam permasalahan di Pedukuhan Ngemplak Karangjati, dapat dilihat adanya perjuangan atas nilai. Nilai yang sebelumnya dibangun oleh elit-elit agama melalui PAMUKTI dihadapkan dengan nilai-nilai baru yang coba dibangun oleh masjid-masjid yang sebelumnya mengikuti PAMUKTI. Ada keinginan untuk menjaga idealitas dari PAMUKTI, yaitu satu suaranya masjid dalam menentukan 1 Syawal dan tidak adanya label ormas tertentu dalam masjid di Ngemplak Karangjati.

Perjuangan itu sendiri muncul setidaknya setelah apa yang menjadi idealitas dari PAMUKTI tersebut tidak sesuai dengan realitas yang diharapkan. Realitas yang tidak sesuai dengan yang diharapkan tersebut ditandai dengan

⁶ Sebagaimana dikutip Graham C Kinloch dalam buku, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi* terj. Dadang Kahmad, Bandung: Pustaka Setia, 2005, hlm. 227

munculnya masjid yang tidak lagi mengikuti ”tradisi” dengan tidak mengikuti pendapat pemerintah.

Bagi pihak yang masih memegang keputusan PAMUKTI menyayangkan adanya masjid yang mengikuti keputusan dari ormas tertentu dalam menentukan tanggal 1 Syawal. Masjid yang masih mengikuti keputusan PAMUKTI yaitu Masjid Shirothol Mustaqim. Sedangkan elit Masjid Shirothol Mustaqim yang sangat kuat mempertahankan keputusan PAMUKTI tersebut yaitu GP.

Diungkapkan oleh GP bahwa sekarang paradigmanya memang telah berubah seiring dengan adanya otonomi daerah. Nampaknya otonomi juga mulai ditarik pada tingkat masjid. Dahulu paradigma yang dibangun; “jika bisa bersama-sama kenapa mesti sendiri-sendiri”, namun sekarang mulai bergeser menjadi “jika bisa sendiri-sendiri kenapa mesti bersama-sama”⁷

Apa yang disayangkan oleh GP tersebut tentu saja tidak sama dengan pengurus takmir masjid yang lain. Kenyataan bahwa saat ini masjid-masjid di Ngemplak Karangjati tidak dapat lagi satu suara dalam menentukan tanggal 1 Syawal menjadi salah satu indikasiinya. PN sebagai ketua takmir Masjid Mujahadah dan NS sebagai ketua takmir masjid Sabilul Muttaqin tetap menghendaki mengikuti keputusan Muhammadiyah untuk masjid mereka masing-masing. Terlepas dari kebijakan masjid mana yang lebih baik, kenyataannya sekarang adalah adanya perbedaan antar masjid dalam mengambil keputusan tentang 1 Syawal. Masjid Shirothol Mustaqim cenderung mengikuti keputusan Pemerintah, sedangkan Masjid Mujahadah dan Sabilul Muttaqin lebih cenderung mengikuti pendapat Muhammadiyah.

⁷Diungkapkan GP pada ceramah subuh di Masjid Shirothol Mustaqim, hari sabtu tanggal 19 September 2009.

Setelah berjalan beberapa tahun, perkembangan yang terjadi di Ngemplak Karangjati tidak terlihat menuju kearah konsensus. Masjid Mujahadah dan Sabilul Muttaqin masih mengikuti keputusan Muhammadiyah dalam menentukan 1 Syawal di masjid mereka. Masjid Shirothol Mustaqim kemudian bergerak, untuk mencoba membangun kembali nilai-nilai lama yang terlupakan. Usaha yang dilakukan diantara dengan menyiapkan sebuah lapangan yang diperkirakan cukup untuk menampung jamaah muslim Ngemplak karangjati. Lapangan ini diharapkan nantinya dapat menjadi tempat sentral penyelenggaraan Sholat Ied bagi masyarakat muslim Ngemplak Karangjati.

Lapangan inilah yang kemudian menjadi sebuah simbol perjuangan untuk mempersatukan umat muslim Ngemplak Karangjati, yang kemudian diberi nama "Lapangan Jati Manunggal". Kembali pada pengertian konflik menurut Lewis Coser, keberadaan lapangan tersebut dapat diartikan sebagai langkah untuk menetralisasikan tujuan-tujuan lawan.

Diungkapkan oleh RM, bahwa GP mengajak pada jamaah pengajian-pengajian yang diasuhanya untuk melaksanakan Sholat Ied di Lapangan Jati Manunggal. Hal itu diungkapkan GP dalam suatu kesempatan pembukaan pengajian gabungan, yang saat itu diselenggarakan di Masjid Mujahadah. Dalam pengajian acara tersebut, diresmikan pula Lapangan Jati Manunggal oleh DH yang merupakan Bapak Lurah Sinduadi⁸. Apa yang dilakukan GP tersebut, dapat dimaknai pula sebagai wujud penguatan kelompok.

Apa yang dilakukan oleh elit-elit Masjid Shirothol Mustaqim tersebut dengan menyiapkan lapangan untuk penyelenggaraan Sholat Ied kurang efektif

⁸ Wawancara dengan RM, Pengurus Pengajian Bapak-bapak, di Rumah RM tanggal 1 Juni 2009.

untuk menetralisasi tujuan lawan mereka. Pengurus Masjid Mujahadah dan Masjid Sabilul Muttaqin tetap menghendaki menyelenggarakan Shoat Ied di masjid mereka masing-masing. Selain itu pengurus Masjid Mujahadah dan Masjid Sabilul Muttaqin juga tetap bertahan dengan mengikuti pendapat dari Muhammadiyah setiap terjadi perbedaan dalam penentuan tanggal 1 Syawal.

Selain itu, usaha lain yang dilakukan adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai sejarah pembangunan masjid-masjid di Ngemplak Karangjati kepada jamaah. Pembangunan masjid-masjid di Ngemplak Karangjati bertujuan sebagai pengintensifan pembinaan keagamaan di lingkup teritorial yang lebih khusus. Dan hilangnya persatuan umat muslim Ngemplak Karangjati yang sebelumnya telah terbangun bukanlah hal yang diharapkan dari berdirinya masjid-masjid.

Selain kepada jamaah di Masjid Shirothol Mustaqim, hal tersebut juga diperluas pada jamaah masjid lain di Ngemplak Karangjati. Hal ini sering dilakukan, misalnya saja oleh Gp pada tiap kesempatan di dalam pengajian yang diasuhnya. Status yang langka dan kekuasaan diperlukan untuk memungkinkan melakukan hal tersebut.

Tidak terdapatnya sistem yang jelas membuat nilai persatuan yang diharapkan sebelumnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat. Dari sinilah kemudian muncul peluang untuk membentuk suatu nilai persatuan yang baru oleh masjid-masjid di Ngemplak Karangjati. Perubahan masyarakat yang cepat sebagai salah satu akibat dari banyaknya warga pendatang juga semakin memperbesar peluang tersebut. Nilai persatuan yang sebelumnya dibangun, bahwa persatuan adalah tanpa perbedaan kini dihadapkan dengan nilai persatuan

yang baru, bahwa persatuan adalah kerukunan, meskipun dengan adanya perbedaan.

Ketika masjid telah berdiri dan sibuk mengembangkan dirinya masing-masing, nampaknya membuat sejarah sebelumnya hanya menjadi sebuah bayang-bayang. Ketika masing-masing masjid tersebut telah mapan, maka kemudian sejarah dimulai dari titik nol kembali. Sejarah mengenai konsensus dari para elit masjid yang sebelumnya tergabung di PAMUKTI menjadi luntur. Dimulailah sejarah baru dan sejarah lama terhapuskan, atau paling tidak dikesampingkan.

Terhapusnya konsensus lama tersebut bisa jadi merupakan akibat banyaknya "orang-orang baru" yang duduk di ketakmiran masjid. Munculnya "orang-orang baru" tersebut tidak memiliki akses yang memadai untuk mengetahui sejarah lama. Disibukkannya takmir pada pengembangan masjid, membuat "orang-orang lama" yang masih duduk di ketakmiran, melupakan sejarah. Atau barangkali nilai-nilai persatuan lama dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang ada saat ini.

Situasi sosial baru yang menghancurkan nilai-nilai tradisional agama atau lainnya, membuat pengembalian nilai itu kehilangan identitas personal dan sosial religius. Hal ini menghadapkan penganut agama pada pilihan sulit; bertahan pada identitas lama yang tidak lagi fungsional, mananggalkan komitmen atas nilai itu atau melakukan tafsir baru atas doktrin keagamaan klasik⁹.

Konflik bagi Coser dianggap sebagai unsur interaksi yang penting, dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah atau merusak. Justru konflik dapat menyumbang banyak pada anggotanya.

⁹ Abdul Munir Mulkan. "Tafsir Identitas dan Kekerasan Keagamaan", *Unisia*, XXV, Februari 2002, hlm. 142.

Hal seperti menghadapi musuh bersama mengintergrasikan orang, menghasilkan solidaritas dan keterlibatan, dan membuat orang lupa akan perselisihan intern mereka¹⁰.

Dengan adanya konflik disini memang memiliki nilai positif, yaitu menjadi titik tolak peringatan akan sejarah mengenai kesepakatan sebelumnya. Dengan adanya konflik tersebut munculnya pihak yang ingin melestarikan kesepakatan lama, menjadi semacam refresh bagi elit-elit agama yang kini mulai tersekat pada teritorial tertentu. Selain bagi elit-elit, fungsi refresh tersebut juga menjadi lebih tersosialisasi pada masyarakat. Jika tidak ada konflik tersebut barangkali masjid akan berjalan dengan "kesadaran palsu", karena meskipun misal tidak terjadi perbedaan, umat muslim Ngemplak Karangjati tidak mengetahui ruh persatuan mereka. Ketika umat muslim Ngemplak Karangjati sudah terlarut dalam "kesadaran palsu" mereka, memungkinkan ketika terjadi permasalahan, nantinya ruh persatuan mereka sudah benar-benar terlupakan.

Meskipun secara kenyataan terdapat masjid yang menghendaki perbedaan, pengetahuan akan sejarah pembangunan masjid, dimungkinkan menjadi sebuah pertimbangan baru. Pengetahuan tersebut akan memunculkan pengertian dan mendorong kearah musyawarah antar masjid. Tidak adanya musyawarah antar masjid inilah yang barangkali menjadi masalah utama, mengingat saat ini memang tidak ada sebuah wadah khusus yang bisa merangkul semua masjid di wilayah Ngemplak Karangjati.

Bagi pihak yang memegang nilai-nilai persatuan lama yang tertanam dalam visi dan fungsi PAMUKTI, munculnya konflik tersebut menjadi sebuah

¹⁰ K. J. Veeger, *Realitas Sosial*, Jakarta: PT Gramedia, 1985, hlm. 212.

pencerahan bahwa masyarakat muslim Ngemplak Karangjati memang telah banyak berubah. Sebelum konflik, kelompok-kelompok mungkin tak percaya terhadap sosisi musuh mereka, tetapi akibat konflik, posisi dan batas antarkelompok ini sering menjadi diperjelas¹¹. Munculnya masjid yang menghendaki perbedaan mengindikasikan bahwa sejarah memang mulai terlupakan. Dibutuhkan suatu penyesuaian baru untuk menyatukan umat muslim Ngemplak Karangjati.

Fungsi konflik menurut Coser dinyatakan dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Konflik dengan satu kelompok dapat membantu menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain. Dalam suatu masyarakat, konflik dapat mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. Konflik juga membantu fungsi komunikasi¹².

Bagi masjid yang berkonflik, meningkatkan ikatan kelompok memang menjadi sebuah keniscayaan. Ikatan kelompok ini akan menjadikan struktur di masjid-masjid baru seperti Masjid Shirothol Mustaqim dan Sabilul Muttaqin menjadi semakin mantap. Karena tanpa pemantapan stuktur-sturktur intern di masing-masing masjid tersebut, usaha untuk mempertahankan dan memperjuangkan nilai tersebut akan sulit dilakukan. Namun batas kelompok bagi masjid yang mempertahankan kesepakatan sebelumnya di PAMUKTI dengan kelompok yang menghendaki perbedaan harus dikaburkan. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan ikatan kelompok adalah sebagai usaha integrasi

¹¹ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern* terj. Alimandan, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 159.

¹² George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern* , hlm. 159.

dengan kelompok lain. Tujuan integratif inilah yang menjadi sebab munculnya kelompok itu sendiri, artinya integrasi adalah tujuan mutlak bagi kelompok ini.

Bagaimanapun konflik dan perbedaan ini terjadi, kerukunan merupakan tujuan yang dikendaki oleh kedua belah pihak. Keadaan ini membuat konflik yang muncul lebih bersifat tertutup dan latent seperti api dalam sekam. Kemunculan konflik yang lebih terbuka, justru akan membuat masing-masing kelompok kehilangan pijakan mereka masing-masing. Tanpa musyawarah, keadaan ini akan berlangsung berlarut-larut. Musyawarah, memungkinkan untuk menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak dapat disebut sebagai *solusi integratif*, karena dapat menyepakatkan, yaitu mengintegrasikan, kepentingan kedua belah pihak. Apapun, meskipun hanya samar-samar, yang membangkitkan harapan untuk ditemukannya suatu alternatif integratif akan meniadakan konflik¹³.

Musyawarah sendiri tidak dapat terlaksana selama apa yang menjadi tujuan kelompok adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Persepsi mengenai tidak adanya alternatif yang baik, kadang-kadang memang bersifat realistik; misalnya suberdaya kritis yang diinginkan kedua belah pihak mungkin memang terbatas kesediaannya. Namun terkadang potensi integrasi tersebut rendah karena adanya persepsi yang salah mengenai keterbatasan. Hal ini sering diakibatkan oleh zero-sum thinking, yaitu cara berfikir bahwa keuntungan saya adalah kerugianmu dan begitu pula sebaliknya¹⁴. Akibatnya, tidak terdapat orientasi yang jelas, dan masyarakat hanya mengikuti arus saja

¹³ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubbin, *Teori Konflik Sosial*, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 38.

¹⁴ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubbin, *Teori Konflik Sosial*, hlm. 39.

C. Keberadaan dan Peran Elit

Ketika di Pedukuhan Ngemplak Karangjati hanya terdapat satu masjid saja, kehidupan masyarakat pada saat itu lebih bersifat paguyuban. Istilah paguyuban tersebut identik dengan apa yang disebut oleh Toennies sebagai *gemeinschaft*. Berdirinya keempat masjid selanjutnya di Pedukuhan Ngemplak Karangjati beriringan pula dengan perubahan masyarakat. Sifat paguyuban masyarakat tersebut berangsur-angsur mulai luntur menjadi masyarakat yang lebih individual.

Pada masyarakat yang bersifat *gemeinschaft* tersebut, hubungan antara masing-masing anggotanya masih kuat. Kuatnya hubungan tersebut juga lebih dilatarbelakangi sikap *afektif*. Banyak kegiatan masyarakat yang masih terpusat secara umum. Kegiatan kemasyarakatan di Pedukuhan Ngemplak Karangjati pada saat itu belum terbagi pada sub-sub wilayah tertentu. Kegiatan kemasyarakatan pada lingkup pedukuhan masih mudah ditemui.

Jika ditinjau dari segi solidaritas dari masing-masing anggota masyarakat paguyuban, maka solidaritas yang terbangun diantara mereka adalah solidaritas mekanis. Mengenai solidaritas dan keadaan masyarakat yang melatar belakanginya tersebut, Durkheim menguraikan:

Dua tipe utama solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Dia berasal dari golongan masyarakat tradisional yang pembagian kerja dalam masyarakatnya masih rendah, norma-norma yang cenderung represif, dan masih ada adanya kesatuan sosial dalam tingkat yang tinggi. Solidaritas organik di sisi lain adalah sifat yang lebih maju, sebuah masyarakat industri dalam pembagian kerja yang begitu kompleks (tidak

sama), meningkatnya hubungan kontrak (yang diikat dengan perjanjian) dan memiliki tingkat integrasi sosial yang lebih rendah¹⁵.

Lebih lanjut diungkapkan Suzanne Keller bahwa apabila masyarakat masih kecil dan belum ter-pecah-pecah menjadi berbagai golongan maka setiap anggota dapat ikut serta langsung dalam usaha melayani kepentingan umum, sehingga solidaritasnya bersifat mekanis¹⁶.

Indikasi dari sifat kepaguyuban di masyarakat Pedukuhan Ngemplak Karangjati saat itu yaitu solidaritasnya yang bersifat mekanis. Solidaritas mekanis tersebut menyebabkan adanya kemudahan untuk saling berbaur diantara masyarakat. Kaitannya dengan keberadaan elit, keadaan masyarakat yang mudah untuk saling berbaur memungkinkan elit agama pada saat itu juga cenderung untuk bisa bersatu. Milss mengungkapkan bahwa:

Melihat elit kekuasaan sebagai suatu kelas sosial dari orang-orang yang memiliki asal-usul dan pendidikan yang sama, yang memiliki "dasar-dasar sosial dan psikologis yang menyatukan mereka atas kenyataan bahwa mereka adalah tipe sosial yang serupa dan menjurus pada fakta kemudahan untuk saling berbaur"¹⁷.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat Pedukuhan Ngemplak Karangjati mengalami dua pola keberadaan elit. Keberadaan elit tersebut terkait erat dengan keadaan masyarakat yang melatar belakanginya. Keadaan masyarakat Pedukuhan Ngemplak Karangjati yang mengalami transisi dari masyarakat paguyuban, menjadi masyarakat yang lebih besar dan kompleks.

¹⁵ Sebagaimana dikutip oleh Graham C Kinloch dalam bukunya, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 90.

¹⁶ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit* (Jakarta: Gratama Offset, 1984), hlm. IV

¹⁷ Sebagaimana dikutip oleh Margaret M. Poloma dalam bukunya, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 340.

Berkembangnya masyarakat menjadi lebih besar dan kompleks, menimbulkan pusat-pusat kekuasaan khusus disamping pusat kekuasaan umum.

Apabila masyarakat bertambah besar dan kompleks maka di samping pusat kekuasaan umum timbul berbagai pusat kekuasaan khusus dalam masyarakat. Dengan demikian timbul solidaritas organis dalam arti bahwa pusat kekuasaan umum atau *rulling elite* tidak lagi dapat berhubungan langsung dengan anggota masyarakat, yaitu dalam hal ini pusat-pusat kekuasaan khusus atau *strategic elite* tadi¹⁸.

Pada kasus di Pendukuhan Ngemplak Karangjati, pusat kekuasaan umum atau *rulling elite* tadi diwakili oleh keberadaan PAMUKTI. Sedangkan keberadaan *strategic elite* atau kekuasaan khusus ditandai dengan munculnya masjid-masjid baru. PAMUKTI sebagai pusat kekuasaan umum keberadaannya merupakan kolektivitas dari para elit masjid. Setelah elit-elit masjid tersebut menempati pusat kekuasaan khusus, maka melemahlah PAMUKTI.

Melemahnya PAMUKTI ditandai dengan hilangnya konsensus dari para elit masjid terkait kebijakannya untuk mengikuti pendapat pemerintah ketika terjadi perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal. Kekuatan PAMUKTI mencapai puncaknya ketika masjid-masjid baru di Pedukuhan Ngemplak Karangjati belum lama berdiri. Saat itu dimungkinkan kepentingan dari masing-masing pusat kekuasaan khusus belum terlalu kompleks.

Keberadaan lembaga keagamaan berupa masjid-masjid baru sebagai tempat berkembangnya *strategic elite* tentu saja membawa fungsi yang berbeda dengan *rulling elite*. Fungsi tersebut lebih mewakili teritorial yang lebih khusus yang berarti pula pada masyarakat yang lebih tertentu.

¹⁸ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit*, hlm. VI.

Elit penentu sebagai kepala dari lembaga-lembaga dan organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi kolektif, dengan begitu memikul kewajiban moral umum yang sebelumnya diharapkan dari semua anggota masyarakat. Satu-satunya solidaritas yang terus mempengaruhi semua anggota adalah bersifat segmental atau teritorial¹⁹.

Adanya perbedaan fungsi tersebut, merubah pula peran elit di masjid-masjid baru. Meskipun sebagian dari mereka sebelumnya merupakan anggota dari *rulling elite*, bukan berarti dapat mempertahankan konsensus sebelumnya ketika berada di wilayah pusat kekuasaan khusus. Elit-elit yang berada di masjid baru memiliki anggota yang berbeda ketika mereka berada di PAMUKTI. Peran elit di masjid baru adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi kolektif dari anggotanya yang baru tersebut

Perubahan masyarakat yang begitu cepat dan bertambahnya penduduk memungkinkan pada kemunculan elit baru pada tataran *strategic elite*. Sehingga kemudian tidak semua elit yang berada pada masjid-masjid baru di Pedukuhan Ngemplak Karangjati tersebut merupakan mantan anggota PAMUKTI yang notabene sebagai *rulling elite*. Hal ini juga menjadi sebab lain dari hilangnya konsensus sebelumnya dari para elit untuk mengikuti keputusan dari Pemerintah ketika mengalami perbedaan penentu tanggal 1 Syawal.

PN sebagai ketua takmir Masjid Mujahadah merupakan salah satu elit baru pada tataran *strategic elite*. Sehingga ketika PN menjabat sebagai ketua takmir di Masjid Mujahadah inilah, Masjid Mujahadah mengambil kebijakan untuk mengikuti pendapat dari Muhammadiyah dalam menentukan tanggal 1 Syawal. Latar belakang PN yang dekat dengan Muhammadiyah juga menjadi salah satu

¹⁹ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit*, hlm. 196.

sebab lain dipilihnya Muhammadiyah sebagai afiliasi dari masjid untuk menentukan tanggal 1 Syawal.

Salah satu pengurus Masjid Mujahadah yang dikatakan cenderung pada keputusan Muhammadiyah yaitu AG. Berbeda dengan PN yang merupakan warga baru di masyarakat Ngemplak Karangjati, AG lebih merupakan orang lama. Keberadaan AG tersebut semakin memperkuat pula pada keberadaan dan kebijakan PN. Dari sinilah dapat ditemukan adanya ikatan baru antar elit ketika berada pada tataran *strategic elit*.

Apa yang menjadi peran elit ketika berada di PAMUKTI berbeda dengan ketika berada di masjid. Ketika berada di masjid sebagai pusat kekuasaan khusus, elit menghadapi jamaah yang lebih khusus baik secara teritorial maupun sikap. Peran dari elit masjid lebih untuk menjalankan fungsi-fungsi kolektifnya bagi jamaah yang lebih khusus tersebut.

Meskipun NS selaku ketua takmir Masjid Sabilul Muttaqin merupakan elit lama yang mungkin pernah berada pula di PAMUKTI, pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti pendapat Muhammadiyah ketika terjadi perbedaan Penentuan 1 Syawal. Perannya sebagai elit di Masjid Sabilul Muttaqin adalah terkait fungsi kolektifnya bagi jamaah Masjid Sabilul Muttaqin. Karena itulah ketika tidak ada gejolak dari jamaah saat masjid tersebut mengikuti keputusan Muhammadiyah, dapat diartikan sebagai berhasilnya NS memikul fungsi kolektifnya bagi jamaah Masjid Sabilul Muttaqin tersebut.

Sedangkan bagi GP yang masih memegang keputusan PAMUKTI, dengan tetap *istiqamah* mengikuti keputusan pemerintah ketika terjadi perbedaan 1 Syawal merupakan wujud penguatan dari *rulling elite* sebelumnya. Namun apa

yang dilakukan GP melalui Masjid Shirothol Mustaqim tersebut menjadi kurang efektif mengingat telah melemahnya PAMUKTI. Fungsi kontrol dari PAMUKTI pada masjid baru dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Elit yang sebelumnya menguatkan PAMUKTI lebih terkonsentrasi pada penguatan masjid sebagai pusat kekuasaan khusus. Sehingga apa yang dilakukan oleh GP tersebut hanya mengingatkan pada "nostalgia" masa lalu bagi para elit yang sebelumnya tergabung dalam PAMUKTI. Apa yang dilakukan GP tersebut bisa jadi membuahkan hasil ketika ada "penyakralan kembali" oleh elit-elit masjid di wilayah *strategic elite* pada kesepakatan lama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapatlah ditairik kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Konflik

Di Pedukuhan Ngemplak Karangjati terjadi perubahan pusat kekuasaan. Perubahan tersebut dipicu oleh perubahan masyarakat. Selanjutnya perubahan pusat kekuasaan tersebut semakin diperjelas dengan keberadaan masjid-masjid baru di Pedukuhan Ngemplak Karangjati.

Keadaan masyarakat yang sebelumnya bersifat paguyuban dan belum terlalu kompleks membuat pusat kekuasaan lebih bersifat umum. Sedangkan masyarakat yang selanjutnya berkembang menjadi lebih kompleks menciptakan pusat kekuasaan yang lebih khusus. Elit-elit agama yang sebelumnya berada pada pusat kekuasaan umum, kemudian terbagi pada pusat-pusat kekuasaan khusus.

Masalah kemudian muncul ketika terjadi perbedaan diantara elit agama dalam mensikapi perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal. Kesepakatan yang sebelumnya dicapai oleh para elit ketika berada pada pusat kekuasaan umum tidak lagi dapat dipertahankan ketika menempati pusat kekuasaan khusus. Kesepakatan tersebut yaitu untuk tidak berbeda antar masjid dalam mengambil keputusan terkait penentuan tanggal 1 Syawal.

Konflik itu sendiri terjadi ketika terdapat elit yang mencoba memperjuangkan kesepakatan lama yang sebelumnya dicapai oleh elit-elit agama ketika masih berada pada pusat kekuasaan umum. Sedangkan di pihak lain, elit agama yang berada di pusat kekuasaan khusus juga mempertahankan kesepakatan intern mereka.

Konflik mempunyai nilai positif karena memicu pada semakin mantapnya struktur pada masjid-masjid baru. Pertahanan dan perjuangan akan kesepakatan intern mereka menuntut juga pada penguatan kelompok. Konflik yang terjadi bersifat latent dan tertutup, karena lebih melibatkan elit masjid dan pengurus masjid. Sedangkan perbedaan yang terjadi merupakan salah satu indikasi konflik yang mencuat ke permukaan, lebih terlihat dan melibatkan banyak orang.

2. Peran Elit

Kaitannya dengan konflik dan perbedaan yang terjadi, elit masjid berperan sebagai penentu kebijakan masjid terkait penentuan tanggal 1 Syawal. Selanjutnya elit masjid menjadi "aktor" konflik ketika mencoba mempertahankan dan memperjuangkan kesepakatan intern diantara mereka. Elit masjid juga berperan pada kemunculan simbol-simbol konflik, ketika elit-elit yang tergabung pada suatu masjid mencoba memperjuangkan apa yang menjadi keinginan mereka.

B. Saran

Isu perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal banyak mempengaruhi kehidupan keagamaan masyarakat. Terlepas dari permasalahan metode

maupun argumen-argumen theologis di seputarnya, perbedaan ini memunculkan gejolak pada masyarakat. Pada lingkup masyarakat yang lebih kecil, seperti di Pedukuhan Ngemplak Karangjati misalnya, gejolak tersebut dapat dilihat secara lebih jelas. Secara sosiologis, kemunculan konflik tersebut dapat dimaknai secara lebih positif. Konflik memunculkan kejelasan akan realitas baru terkait keadaan masyarakat. Dinamika dalam masyarakat memang merupakan suatu hal yang tak dapat dihindarkan. Karena itulah, perlu bagi para pemuka agama dan institusi-institusi pemberdayaan umat, untuk mengetahui dan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini diperlukan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan, terkait fungsinya sebagai agen pengontrol dan pembinaan umat. Selain itu diperlukan pula musyawarah antara masing-masing pemuka agama terhadap permasalahan yang ada, sehingga permasalahan yang ada tidak berlarut-larut dan mengorbankan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Mahfud. *Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan Perseteruan Elit Lokal: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sragen Tahun 2006*. Yogyakarta: Skripsi, Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007.
- Azhari, Susiknan. *Hisab dan Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- , *Enslikopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Bottomore, T.B. *Elite dan Masyarakat*, terj. Abdul Haris dan Sayid Umar. Jakarta: Akbar Tanjung Institute. 2006.
- Hamid, Ali Hasan Ali Abdul dan Al-Hilali Salim. *Puasa Bersama Nabi*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2004.
- Hanif, Muklas. *Muhammadiyah di Tengah Masyarakat Nahdatul Ulama (NU) di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur*. Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002.
- Keller, Suzanne. *Penguasa dan Kelompok Elit*. Jakarta: CV Rajawali. 1984
- Khoiruddin, Akhmad Yusuf. *Konflik Antar Pemuka Agama Tentang Tradisi Tablilan*. Yogyakarta: Pustaka Fahima. 2005.
- Kinloch, Graham. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi* terj. Dadang Kahmad, Bandung: Pustaka Setia. 2005.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Islam Murni Dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya. 2000.
- , "Tafsir Identitas dan Kekerasan Keagamaan", *Unisia*, XXV. 2002
- Paloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Pruit, Dean G. dan Rubbin, Jeffrey Z. 2009. *Teori Konflik Sosial*. terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Rudiati, Amirul Fajar. *Lembaga Swadaya Masyarakat dan Elit Lokal; Suatu Tinjauan Tentang Hubungan Antara LPTP dan Elit Lokal di Desa Banyuwang Kecamatan*

Ampel Kabupaten Boyolali Jawa Tengah Dalam Upaya Memperoleh Dukungan Kelompok Sasaran. Skripsi, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2004.

Schmandt, Henri J. *Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

Simuh. *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa.* Jakarta: Teraju. 2003.

Soehada, Moh. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2004.

Soekanto, Soeryono. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada. 2001.

Soelaeman, Munandar. *Ilmu Sosial Dasar,* Bandung: Eresco. 1993.

Sudjangi. *Pluralitas sosial, Hubungan Antara Kelompok Agama dan Kerukunan.* Yogyakarta: dalam Jurnal Harmoni vol.II No 5. 2003.

Turner, Bryan S. *Agama dan Teori Sosial.* Yogyakarta: iRCiSoD. 2006.

Usman, Sunyoto. *Agama dan Aspirasi Rakyat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1994.

Veeger, K. J. *Realitas Sosial.* Jakarta: PT Gramedia. 1985.

Weber, Max. *Sosiologi,* terj. Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber dari Internet :

www.muttaqiena.blogspot.com

www.darul-ulum.blogspot.com



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan - Danturejan, Yogyakarta - 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor: 070/589

Membaca Surat : Dekan Fak. Ushuluddin-UIN''SUKA'' Yk No: UIN.02/DU/TL.03/07/2009
Tanggal: 16 Desember 2009 Perihal: Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dijinkan kepada

Nama : MUHAMMAD ISANI IMAMUDDIN DESYA NIM: 04541700

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : ELIT AGAMA OKAL DALAM DINAMIKA PERAYAAN IDUL FITRI (Studi Deskriptif Tentang Terpecahnya Masjid Dalam Menentukan Hari Raya dan Penyelenggaraan Sholat Ied di Pedukuhan Ngemplak Karangjati Antara Tahun 2004-2008)

Lokasi : Kab. Sleman

Waktu : mulai tanggal 25 Januari 2009 s/d 25 Mei 2009

Kerentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
2. Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk* (CD), dan menunjukkan cetakan asli;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
4. Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Januari 2009

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman c.q. Ka. BAPPEDA;
3. Dekan Fak. Ushuluddin-UIN''SUKA'' Yk;
4. Yang bersangkutan.



SURAT DIJUMADAL

NIP. 010 154 543



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax (0274) 868800. e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 340 / 2009

**TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070 / 589 Tanggal: 25 Januari 2009. Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **MUHAMMAD TSANI IMAMMUDDIN DESYA**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 04541700
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Ngemplak Krangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman
No. Telp / Hp : 0274 625036
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
"ELIT AGAMA LOKAL DALAM DINAMIKA PERAYAAN
IDUL FITRI (Studi Deskriptif Tentang Terpecahnya Masjid
Dalam Menentukan Hari Raya dan Menyelenggarakan
Sholat Ied di Pedukuhan Ngemplak Karangjati antara Tahun
2004-2008)"
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 4 (empat) bulan mulai tanggal : 25 Januari 2009 s.d
25 Mei 2009

Dengan ketentuan sebagai berikut :

6. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
7. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
8. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 CD atau 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
9. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.
10. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.
Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 25 Februari 2009

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Dep. Agama Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
5. Camat Kec. Mlati
6. Ka. Desa Sinduadi, Mlati
7. Dekan Fak. Ushuluddin – UIN "SUKA" Yogyakarta
8. Pertinggal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Tekn. & Kerjasama
a.b. Ka. Sub Bid. Data & Informasi



CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Tsani Imamuddin Desya
TTL : Sleman, 17 April 1986
Alamat : Ngemplak Karangjati RT: 09 RW: 038 Sinduadi Mlati Sleman
Yogyakarta
Motto : FURT (for you to remember or trash)
Cita-Cita : Entrepreneur

Orang Tua/Wali :

Ayah : Gampang Sagimin
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Ibu : Badriyatun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Ngemplak Karangjati RT: 09 RW: 038 Sinduadi Mlati Sleman
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

SD Negeri Petinggen Yogyakarta (Lulus Tahun 1998)
SMP Negeri 12 Yogyakarta (Lulus Tahun 2001)
Madrasah Aliyah Negeri I Yogyakarta (Lulus Tahun 2004)
UIN Sunan Kalijaga (Masuk Tahun 2004)